

MUHAMMAD SAFRI

# *Pengembangan* **WISATA ALAM**

**DENGAN PENDEKATAN BIAYA PERJALANAN**



**PENGEMBANGAN WISATA ALAM  
DENGAN PENDEKATAN BIAYA  
PERJALANAN**

**MUHAMMAD SAFRI**



**pena persada**

**PENERBIT CV. PENA PERSADA**

---

**PENGEMBANGAN WISATA ALAM DENGAN PENDEKATAN  
BIAYA PERJALANAN**

**PENGEMBANGAN WISATA ALAM DENGAN PENDEKATAN  
BIAYA PERJALANAN**

**Penulis:**

Muhammad Safri

**ISBN :** 978-623-93873-0-3

**Design Cover :**

Retnani Nur Brilliant

**Layout :**

Nisa Falahia

**Penerbit CV. Pena Persada**

**Redaksi :**

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas  
Jawa Tengah

Email : [penerbit.penapersada@gmail.com](mailto:penerbit.penapersada@gmail.com)

Website : [penapersada.com](http://penapersada.com)

Phone : (0281) 7771388

**Anggota IKAPI**

All right reserved

Cetakan pertama : 2020

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang  
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa ijin  
penerbit

## KATA PENGANTAR

Segala puji kehadirat Allah Swt. atas semua limpahan rakhmat dan hidayahNya, dengan telah terbitnya buku, **“Pengembangan Pariwisata Alam Dengan Pendekatan Biaya Perjalanan”**. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini, mudah-mudahan kehadirannya dapat memberikan sumbangan positif terhadap sisi teoritis dunia pariwisata alam, implementasi kebijakan bagi pemerintah dan para pihak lainnya maupun masyarakat umum.

Menurut hemat penulis, penerbitan buku sejenis relatif masih sangat sedikit. Hal demikian menjadi dorongan tersendiri bagi kami untuk ikut memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang mungkin bermanfaat bagi kalangan akademisi maupun masyarakat umum lainnya. Pendekatan biaya perjalanan hanyalah sebagai sebagai satu alat penilaian dalam valuasi ekonomi lingkungan, dengan demikian uraian dalam buku ini akan dapat ikut menambah khasanah pemikiran dan penerapannya dalam kebijakan nyata.

Akhirnya semua semua masukan yang sifatnya membangun akan diterima dengan senang hati dan kepada penerbit Pena Persada yang telah melakukan kerjasama dan bersedia menerbitkan buku ini, secara khusus terima kasih dan penghargaan yang tinggi.

Jambi, Mei 2020

Muhammad Safri

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II PARIWISATA ALAM.....	6
A. Pariwisata Kembali ke Alam.....	6
B. Pariwisata Berkelanjutan .....	10
C. Sejarah Taman Nasional .....	15
BAB III OTONOMI DAERAH .....	22
BAB IV PARIWISATA ALAM DAN AKULTURASI BUDAYA.....	27
BAB V KEMAJUAN EKONOMI LINGKUNGAN .....	29
BAB VI PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT .....	31
BAB VII PENDEKATAN BIAYA PERJALANAN .....	36
A. Evaluasi Ekonomi .....	36
B. Pwndwkatan Biaya Perjalanan .....	38
C. Permintaan Dalam Kepariwisataaan .....	39
D. Permintaan dan Penawaran ( <i>Supply and Demand</i> ) .....	42
BAB VIII PARIWISATA MENINGKATKAN EKONOMI .....	45
A. Laju Pembangunan Ekonomi .....	46
B. Faktor-Faktor Penyebab Pertumbuhan Daerah.....	47
BAB IX PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI INDUSTRI PARIWISATA DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH .....	49
BAB X PENUTUP .....	59
DAFTAR PUSTAKA .....	61

# BAB I

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam dan budaya yang melimpah dan beragam. Keberagaman kekayaan sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia, seperti potensi alam, flora, fauna, panorama alam dengan berbagai wilayah yang kaya akan adat istiadat, kebudayaan, dan bahasa memiliki daya tarik untuk dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun domestik. Hal ini menjadi salah satu daya tarik bagi para wisatawan yang dapat mendorong pemerintah untuk mendirikan industri pariwisata khususnya di daerah masing-masing yang mempunyai potensi wisata untuk dapat menarik wisatawan berkunjung ke daerahnya sehingga dapat menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Pendapatan masyarakat menyebabkan meningkatnya konsumsi barang dan jasa. Salah satunya adalah jasa perjalanan wisata yang ditawarkan oleh industri-industri pariwisata akhir-akhir ini. Perjalanan wisata merupakan kegiatan meninggalkan tempat tinggal untuk berlibur mencari udara segar yang baru untuk memenuhi rasa ingin tahu, ketenangan saraf, maupun menikmati keindahan alam. Berpariwisata merupakan suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggal (Swantoro, 1997 :3 dalam Igunawati, 2010).

Kepariwisataan Indonesia adalah pariwisata yang berbasis alam dan budaya. Letak geografis Indonesia yang diapit 2 benua (Asia dan Australia) menjadi lokasi yang strategis bagi para wisatawan mancanegara untuk berlibur. Ditambah lagi rendahnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing tentu menambah daya tarik sektor pariwisata Indonesia. Dengan adanya potensi sektor pariwisata di Indonesia, hal ini dapat

meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional baik dalam bentuk devisa asing maupun perputaran uang di dalam negeri. Pariwisata juga bermanfaat dalam meningkatkan lapangan kerja, taraf hidup, dan pendapatan masyarakat (Famytyas, 2014).

Perkembangan kegiatan ekowisata di Indonesia lebih mengarah pada kawasan yang dilindungi (kawasan hutan konservasi) karena obyek daya tarik wisata alamnya yang lebih tinggi. Salah satu lokasi tujuan kegiatan ekowisata yaitu kawasan Taman Wisata Alam (TWA). Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi alam (Premono B. et al, 2008). Pengembangan pariwisata memiliki tiga fungsi yaitu menggalakan ekonomi, memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup, memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa (Joyosuharto, 1995 dalam Soebagyo, 2012).

Pariwisata merupakan sektor yang sangat kompleks karena pariwisata bersifat multidimensi, baik fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik. Selain itu kegiatan pariwisata sebagai kegiatan matarantai akan melibatkan berbagai sektor dan lembaga yang terkait. Berkembangnya sektor pariwisata di suatu negara akan menarik sektor lain untuk berkembang pula karena produk-produknya diperlukan untuk menunjang industri pariwisata, seperti sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan rakyat, peningkatan kesempatan kerja, dan lain sebagainya. Kecenderungan perkembangan dunia pariwisata mulai meninggalkan konsep pariwisata massal dan mengarah kepada konsep pariwisata lingkungan (ecotourism), dimana keaslian potensi kekayaan alam dan peran serta masyarakat setempat dibutuhkan. Indonesia yang merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan alam yang berlimpah ruah mempunyai peranan yang sangat penting bagi pengembangan kepariwisataan terutama wisata alam. Penilaian terhadap suatu kawasan wisata memiliki

peranan yang dapat menentukan pengembangan dari tempat wisata itu sendiri yang mencakup berbagai faktor yang berkaitan dengan nilai sosial dan politik. Menurut Ward et.al, 2000 (dalam Rahardjo) metode penilaian khususnya untuk mengukur nilai ekonomi wisata alam yang paling banyak dipakai adalah Travel Cost Method (TCM). Metode ini menduga nilai ekonomi kawasan wisata berdasarkan penilaian yang diberikan masing-masing individu atau masyarakat terhadap kenikmatan yang tidak ternilai (dalam rupiah) dari biaya yang dikeluarkan untuk berkunjung ke sebuah objek wisata, baik itu opportunity cost maupun biaya langsung yang dikeluarkan seperti biaya transportasi, konsumsi makanan, minuman, hotel, tiket masuk dan sebagainya.

Secara ekonomi pariwisata massal telah memberikan manfaat yang besar, akan tetapi aspek sosial dan lingkungan kurang diperhatikan. Selain itu, dampak positif dari aspek ekonomi pariwisata massal kurang dirasakan oleh masyarakat setempat. Menurut Sihite (2000), hal ini antara lain disebabkan pariwisata massal lebih banyak menggunakan fasilitas atau bahan impor sehingga dampak gandanya (*multiplier effect*) bagi masyarakat setempat sangat kecil. Penggunaan sarana pariwisata yang berasal dari modal asing (misalnya hotel), juga menyebabkan kurangnya kemandirian ekonomi masyarakat.

Dalam aspek sosial dan lingkungan, Soemarwoto (2001) menyatakan bahwa pariwisata massal telah menimbulkan berbagai permasalahan. Masyarakat setempat dalam pariwisata massal dapat terusir akibat konversi lahan pertanian untuk pembangunan prasarana pariwisata yang tidak terkendali. Rumah-rumah asli penduduk dan bangunan yang bernilai sejarah berkurang keasliannya karena terlalu menekankan aspek komersial. Pariwisata massal juga menyebabkan peningkatan tindak kejahatan atau munculnya perilaku yang bertentangan dengan norma adat setempat. Nilai-nilai asli kesenian maupun upacara tradisional akan berkurang keasliannya karena perubahan orientasi yang cenderung komersial.

Pembangunan, termasuk pembangunan pariwisata yang terlalu berorientasi pada manfaat ekonomi mengurangi jumlah dan mutu sumberdaya hutan. Menurut Bank Dunia (2001) dan Alikodra (1998), laju penggundulan hutan di Indonesia periode 1985 sampai 1987 sebesar 16.5% atau 1 641 708 ha per tahun. Fenomena ini salah satu contoh tidak diperhitungkannya daya dukung alam. Kunjungan wisatawan yang terlalu besar dan tidak terkendali ke sebuah kawasan jelas akan mempengaruhi lingkungan setempat. Habitat satwa akan terganggu oleh keriuhan suara pengunjung, atau oleh suara kendaraan, dan sampah-sampah cenderung dibuang di sembarang tempat. Tindakan yang tidak terpuji lainnya berupa penebangan hutan/kayu untuk bahan bangunan sarana pariwisata, penggunaan tanah dan air/sungai yang kurang memperhatikan kelestarian. Terdapat corat coret fasilitas penunjang pariwisata, atau tanda-tanda reklame yang mengurangi keindahan alami.

Untuk meminimalisir dampak negatif pariwisata massal, dewasa ini berkembang pariwisata alam atau lebih dikenal dengan ekoturisme (*ecotourism*). Pariwisata ini dianggap sebagai salah satu pendekatan wisata yang bertanggung jawab, wisata yang berorientasi konservasi, dan wisata yang berkelanjutan. Wisatawan memilih melakukan perjalanan ke kawasan alami untuk berpetualang, mengagumi dan menikmati keindahan alami. Menurut Kodhyat (1998), keuntungan ekoturisme antara lain, 1) memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, 2) tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat, dan 3) keberlanjutannya lebih terjamin. Ziffer & Young (1989) menambahkan bahwa keuntungan ekoturisme adalah: 1) meningkatkan perolehan dana konservasi, 2) meningkatkan pembangunan ekonomi, dan 3) menghindari pengrusakan sumberdaya alam.

Industri pariwisata dalam tahun 1997 secara global menghasilkan US \$ 3.8 triliun Hasil Bruto (*Gross Output*) dan 262 juta pekerjaan di seluruh dunia. Diperkirakan perolehan tersebut dalam tahun 2007 akan tumbuh menjadi US\$ 7.1 triliun Hasil

Bruto dan 383 juta pekerjaan (Yoeti 1999). Lebih lanjut, Yoeti (1999) menyatakan bahwa untuk Indonesia pada tahun 1997 diperoleh Hasil Bruto sebesar Rp 64.480 milyar dan 6.6 juta pekerjaan dan untuk tahun 2007 diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 248.363 milyar Hasil Bruto serta 8.5 juta pekerjaan. Uraian tersebut menunjukkan bahwa pariwisata massal memberikan sumbangan yang signifikan dalam ekonomi

## BAB II

# PARIWISATA ALAM

### A. Pariwisata Kembali Ke Alam

Pariwisata merupakan salah satu industri yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal penyediaan lapangan kerja, pendapatan, tarif hidup, dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara peneri ma wisatawan. James J. Spillane (1989) dalam Badrudin (2000) mendefinisikan pariwisata sebagai kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mencari kepuasan, mencari sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah dan lain-lain. Berikut adalah jenis-jenis pariwisata, menurut James J. Spillane (1989) dalam Badrudin (2000) yang terdapat di daerah tujuan wisata yang menarik customer untuk mengunjunginya sehingga dapat pula diketahui jenis pariwisata yang mungkin layak untuk dikembangkan dan mengembangkan jenis sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata tersebut.

1. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (pleasure tourism) Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, mencari udara segar yang baru, untuk mengendorkan ketegangan syarafnya, untuk menikmati keindahan alam, untuk menikmati hikayat rakyat suatu daerah, untuk menikmati hiburan, dan sebagainya.
2. Pariwisata untuk rekreasi (recreation sites) Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang yang menghendaki pemanfaatan hari-hari libur untuk istirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohani, yang akan menyegarkan keletihan dan kelelahannya.
3. Pariwisata untuk Kebudayaan (cultural tourism) Jenis pariwisata ini ditandai oleh adanya rangkaian motivasi

seperti keinginan untuk belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset, untuk mempelajari adat istiadat, cara hidup masyarakat negara lain dan sebagainya.

4. Pariwisata untuk Olahraga (sports tourism) Jenis pariwisata ini bertujuan untuk tujuan olahraga, baik hanya untuk menarik penonton olahraga dan olahragawannya sendiri serta ditujukan bagi mereka yang ingin mempraktikkannya sendiri.
5. Pariwisata untuk urusan dagang besar (business tourism) Dalam jenis pariwisata ini, unsur yang ditekankan adalah kesempatan yang digunakan oleh pelaku perjalanan ini yang menggunakan waktu-waktu bebasnya untuk menikmati dirinya sebagai wisatawan yang mengunjungi berbagai obyek wisata dan jenis pariwisata lain.
6. Pariwisata untuk konvensi (convention tourism) Banyak negara yang tertarik dan menggarap jenis pariwisata ini dengan banyaknya hotel atau bangunan-bangunan yang khusus dilengkapi untuk menunjang convention tourism.

Semboyan kembali ke alam (*back to nature*) mengisyaratkan kembalinya kesadaran orang akan peran alam dan sumberdayanya. Orang mulai berpaling kembali untuk menikmati atau mengagumi keindahan alam dan hidup secara alami-bersahabat dengan alam. Keinginan ini pada gilirannya melahirkan minat orang-orang untuk melakukan kegiatan wisata alam. Pariwisata alam atau yang lebih dikenal dengan "ekoturisme" didefinisikan sebagai perjalanan ke daerah-daerah yang masih alami yang dapat mengkonservasi dan memelihara kesejahteraan masyarakat setempat (*The Ecotourism Society 1993*).

Dalam perkembangan berikutnya, pariwisata alam telah berhasil mengembangkan perekonomian berbagai negara di dunia. Pariwisata ini pada mulanya dikembangkan di negara-negara Amerika Latin dan Afrika, dan sekarang telah berkembang dengan pesat di USA, Canada, Australia, negara-negara Eropa bahkan di Asia. Mereka memelihara dan menata

obyek-obyek wisata alam kemudian mempromosikannya sehingga menarik minat para wisatawan. Negara Thailand yang pada puluh tahun lalu banyak menghasilkan devisa dari sektor pariwisata lain, telah merubah strategi dan orientasi pariwisatanya menjadi berbasiskan pariwisata alam. Roznava, sebuah negara di Eropa Timur berhasil dengan pariwisatanya yakni dengan mengembangkan Pusat Latihan Pariwisata Pedesaan dan memilih pemimpinnya dari komunitas masyarakat lokal setempat (Clarke et al. 1999).

Di Rwanda, Varunga Volcanoes dibuka untuk wisatawan. Mereka dikenai biaya US \$ 170 sejam untuk melihat gorila. Iuran ini telah menghasilkan lebih dari US \$ 1 juta dari karcis pintu masuk, dan kunjungan wisatawan ini telah memberikan intensif yang kuat bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan untuk melindungi gorila, yang sekarang merupakan sumber penghasilan utama. Pemerintah Kanada juga mendapatkan dampak positif. Pada tahun tahun 1987 saja dampak pariwisata alam terhadap GDP sebesar Can \$ 6,5 miliar, pemasukan dari sektor pajak sebesar Can \$ 2,5 miliar, terhadap pendapatan per kapita sebesar Can \$ 3,7 miliar, dengan membuka lapangan kerja bagi 159 ribu orang (Alikodra 1999). Secara keseluruhan, industri pariwisata (*ecotourism*) di Afrika Selatan telah menjadi industri nomor tiga terbesar yang menyumbang pertumbuhan ekonomi negara tersebut setelah sektor industri dan pertambangan (Loon 2001).

Untuk Indonesia, pada tahun 1984 telah lahir Lembaga Studi Pariwisata Indonesia (LSPI). Lembaga ini sejak awal berdirinya telah telah berwawasan ekoturisme, sebab lembaga tersebut telah memiliki pandangan mengenai konsep pariwisata berwawasan lingkungan. Pada Januari 1996, lembaga dimaksud menyelenggarakan sebuah simposium tentang ekoturisme yang menghasilkan prinsip, kriteria serta definisi ekoturisme yang sesuai bagi Indonesia. Menurut INDECON - *Indonesia Ecotourism Network* (1996), ekoturisme sebenarnya merupakan penyelenggaraan wisata bertanggung

jawab di tempat-tempat alami dan/ atau daerah-daerah yang dibuat berdasarkan kaedah alam, yang mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan kebudayaan) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh Omans (1995) dalam jurnalnya ditambahkan bahwa melalui pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan yang didapat oleh seorang ekoturis maka akan terbangun pengertian yang lebih besar, perubahan sikap serta tanggung jawab terhadap lingkungan. Menurut Tosun (2000), khusus untuk isu-isu lingkungan yang berkenaan dengan pariwisata alam di negara-negara berkembang lebih banyak tergantung pada kondisi sosial politik dan ekonomi negara setempat. Untuk itu harus ditindaklanjuti melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional guna menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Prinsip dan kriteria ekoturisme dimaksud sebagai berikut:

1. Memiliki kepedulian, tanggungjawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan, dengan kriteria-kriteria: memperhatikan kualitas daya dukung lingkungan kawasan tujuan ekoturisme, mengelola jumlah pengunjung, sarana dan fasilitas sesuai dengan daya dukung lingkungan daerah tujuan ekoturisme, meningkatkan kesadaran dan apresiasi para pelaku ekoturisme terhadap lingkungan, memanfaatkan sumberdaya lokal secara lestari, meminimumkan dampak negatif yang ditimbulkan, bersifat ramah lingkungan untuk menjamin kesinambungan usaha.
2. Pengembangan harus didasarkan atas musyawarah dan persetujuan masyarakat setempat, dengan kriteria-kriteria: pembangunan hubungan kemitraan dengan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan ekoturisme, menginformasikan secara jelas dan benar arah pengembangan kawasan tersebut kepada masyarakat setempat, memberi kebebasan kepada masyarakat untuk bisa menerima atau menolak pengembangan ekoturisme.

3. Memberi manfaat kepada masyarakat setempat, dengan kriteria: membuka kesempatan kepada masyarakat setempat untuk menjadi pelaku-pelaku ekonomi kegiatan ekoturisme baik secara aktif maupun pasif, memberi pendampingan dan pemberdayaan kepada masyarakat setempat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi, meningkatkan keterampilan masyarakat setempat.
4. Peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan yang dianut masyarakat setempat, kriteria-kriteria: kode etik bagi wisatawan harus diperkenalkan kepada pengelola dan wisatawan.
5. Memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kepariwisataan, secara konsisten: Undang-undang nomor 4 tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya, Undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Keppres nomor 32 tahun 1990 tentang Kawasan Lindung, Undang-undang nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisata dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

## **B. Pariwisata Berkelanjutan**

Industri pariwisata masih terus diteliti dengan cermat untuk menemukan kriteria yang dapat mendukung wisata yang berkelanjutan. Konsep pariwisata berkelanjutan mewujudkan sebuah tantangan untuk membangun pariwisata dunia yang kualitas produknya relatif tidak memberikan pengaruh yang merugikan terhadap lingkungan Wisata berkelanjutan disamakan dengan sejumlah istilah, seperti wisata alternatif, wisata pedesaan, wisata hijau, wisata yang pantas, wisata yang bertanggung jawab, atau wisata progresif. Namun, kritik telah dilontarkan terhadap wisata alternatif karena memberi kesan merupakan sebuah konsep yang elitis dan

menempatkannya pada suatu skala dimana wisata massal berlawanan dengan wisata alternatif.

Pembangunan berkelanjutan dapat diberi batasan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan sekarang dan yang akan datang dari aspek fisik, kimia, biologi serta sosial ekonomi (Suratmo 1999) atau secara singkat dapat dikatakan sebagai pembangunan yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Menurut Weight (1996), pariwisata berkelanjutan disamakan dengan kawasan pedesaan dalam suatu terminologi inti persoalan menjadi wisata alternatif, wisata pedesaan, wisata hijau, wisata yang tepat/sesuai, wisata yang bertanggungjawab atau wisata progressif. Berkelanjutan dalam pariwisata harus melestarikan lingkungan dalam jangka panjang, serta aspek ekonomi dan sosial masyarakat setempat (Marin and Jafari 2002). Terdapat tiga faktor yang harus diperhatikan untuk pariwisata berkelanjutan, yaitu: 1) diversifikasi aktivitas wisata; 2) hubungan antar *stakeholders*, masyarakat setempat, pengelola pariwisata, perencana dan manajer lingkungan; 3) komponen masyarakat lokal dan kapasitas *entrepreneur*. Ekoturisme banyak digunakan oleh berbagai pihak sebagai solusi bagi masalah yang ditimbulkan oleh wisata massal. Ekoturisme seharusnya tidak dipandang sebagai alternatif bagi wisata massal, namun dianggap sebagai salah satu pendekatan bagi wisata yang bertanggung jawab, wisata yang berorientasi konservasi, dan wisata yang berkelanjutan. Konsep pariwisata berkelanjutan memasukkan sebuah tantangan untuk mengembangkan kapasitas dunia wisata dan kualitas produk tanpa merugikan lingkungan (Weight 1996).

Pariwisata berkelanjutan dengan kata lain merupakan kegiatan wisata yang diselenggarakan dengan berazaskan prinsip-prinsip ekologis dan ekonomis. Secara ekologis

kegiatan tersebut selalu diharapkan memelihara keseimbangan yang dinamis dari ekosistem daerah tujuan wisata. Daerah tujuan wisata diharapkan akan tetap menjadi asset wisata yang terpelihara. Daerah tujuan wisata berupa kawasan konservasi tetap berfungsi sebagai kawasan konservasi, demikian pula jika daerah tujuan wisata itu merupakan kawasan budidaya, maka daya dukungnya dapat ditingkatkan sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk.

Dimensi kemanusiaan pariwisata berkelanjutan terbagi atas dua bagian. Pertama, dimensi politik, ekonomi dan sosial budaya. Kedua, dimensi struktur produksi yang terdiri dari kualitas produk dan pelayanan. Sedangkan dimensi ekosistem terdiri dari empat bagian. Pertama, dampak lingkungan umum. Kedua, kualitas ekosistem dari air, udara dan tanah. Ketiga, plasma nutfah flora dan fauna dan keempat kebijakan manajemen dan lingkungan (Ko James 2001).

Ditinjau dari sudut lingkungan, tujuan wisata tersusun oleh komponen fisik, biotik, sosial ekonomi dan budaya. Ketiga aspek itu membentuk kesatuan ekosistem yang saling terkait satu sama lain. Perubahan yang terjadi pada salah satu unsur cepat atau lambat akan berdampak pada unsur yang lainnya. Unsur budaya mencakup nilai-nilai kepercayaan, perilaku, kebiasaan, moral, seni, hukum, dan sejarah yang harus dihormati sehingga tidak menimbulkan friksi-friksi budaya yang dapat menyebabkan timbulnya konflik.

Dalam prakteknya, industri ekoturisme sering ditentukan oleh faktor penawaran (*supply*) dan faktor permintaan (*demand*). Penyedia jasa secara khusus banyak yang tertarik untuk pengembangan penawaran guna merespon permintaan pasar. Padahal, permintaan dan orientasi yang memfokuskan pada permintaan akan menjadi tidak seimbang dan belum tentu cocok dengan industri ekoturisme.

Atas dasar kekuatiran akan dampak negatif yang ditimbulkan oleh wisatawan terhadap lingkungan alami, perlu diperhatikan beberapa tehnik untuk memperkecil dampak perjalanan wisatawan (Weight 1996). Teknik tersebut, pertama wisatawan harus dibagi atas kelompok kecil kurang dari 10 orang. Kedua, harus ada persiapan makanan dan minuman. Ketiga, tidak mencemari sumber (mata) air dengan limbah. Keempat, membawa atau membuang sampah ke luar areal atau pada tempat yang telah ditentukan. Kelima, berjalan pada jalan setapak

yang telah ditentukan. Keenam, menyarankan pada pengunjung agar menggunakan sepatu *boot*. Ketujuh, memilih tempat yang cocok untuk perkemahan. Kedelapan, hanya menggunakan ranting-ranting pohon yang sudah mati (jatuh ke tanah) bila diperlukan sebagai kayu bakar.

Beberapa masalah atau dampak negatif yang membuat kegiatan ekoturisme tidak berkelanjutan, berhubungan dengan kenyataan bahwa prinsip-prinsip dasar ekoturisme tidak diakomodasikan ke dalam konsepsi, perencanaan desain, pengembangan, kegiatan, atau pemasaran produk. Seringkali operator wisata swasta atau bahkan pemerintah terjebak pada penggunaan ekoturisme untuk menjual suatu wilayah atau produk dengan berorientasi kepada kepentingan ekonomi jangka pendek tanpa memperdulikan prinsip-prinsip ekoturisme. Padahal bumi menghendaki kesadaran etis dari para pelancong akan nilai-nilai pelestarian yang tinggi.

Ekoturisme adalah sebagai sebuah pengalaman perjalanan alami disertai penerangan yang memberi kontribusi terhadap konservasi ekosistem yang menarik bagi integrasi komunitas. Ekoturisme memberikan suatu perspektif nilai dan sumberdaya alam dan berimplikasi kepada terjadinya suatu keseimbangan dalam hal sumberdaya alam, industri pariwisata, masyarakat lokal dan pengunjung.

Paling tidak, untuk membangun dan mengembangkan pariwisata di kawasan lindung adalah perlu memperhitungkan 3 (tiga) potensi dampak yang dapat membahayakan kondisi hutan, yakni: menyangkut pemahaman para wisatawan, jumlah pengunjung dan tekanan terhadap kawasan hutan untuk akomodasi dan/atau kebutuhan kegiatan pariwisata.

Pemahaman wisatawan akan manfaat kawasan hutan terkadang masih kurang sehingga mereka adakalanya melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu flora, fauna maupun ekosistem hutan tropika baik sengaja maupun tidak sengaja. Sampah berceceran, pohon-pohon ada yang dirusak/tebang. Sedangkan jumlah pengunjung yang terlalu banyak akan dapat mengganggu proses ekologi yang terjadi di hutan tropika.

Menurut Weight (1996), terdapat 9 (sembilan) prinsip dasar untuk pariwisata berkelanjutan meliputi:

1. Tidak mendegradasikan sumberdaya dan mengembangkan sikap lingkungan.
2. Menciptakan partisipasi dan memenuhi persyaratan pengalaman.
3. Memberikan pendidikan atas semua anggota komunitas lokal, NGO, industri dan pariwisata sebelum, sesudah dan selama perjalanan.
4. Pertemuan yang muncul oleh kesadaran semua anggota terhadap nilai-nilai intrinsik dari sumberdaya.
5. Adanya pengakuan atas nilai-nilai sumberdaya dengan terminologi yang ada serta adanya kesadaran atas Batasan-batasannya.
6. Peningkatan pengertian dan *partnership* antara pelaku, termasuk pemerintah; NGO, industri, keilmuan dan masyarakat lokal.
7. Meningkatkan moral dan tanggung jawab etika menuju pada perilaku yang alami dan lingkungan budaya oleh semua pelaku pariwisata.

8. Memberi manfaat jangka panjang pada sumberdaya lokal, masyarakat setempat, industri, keilmuan, sosial, budaya atau ekonomi.
9. Pelaksanaan ekoturisme memberi jaminan atas etika tanggung jawab praktek lingkungan.

Pariwisata alam bersifat minat khusus dan jika berkembang menjadi pariwisata massal, maka jumlah kunjungan wisatawan yang banyak akan dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, baik oleh karena pembangunan sarana prasarana, pembuangan sampah sembarangan ataupun gangguan terhadap flora dan fauna yang terdapat di dalam kawasan wisata. Untuk itu diperlukan tindakan pengendalian dalam manajemen pengelolaan kawasan wisata alam.

### C. Sejarah Taman Nasional

Indonesia termasuk salah satu negara (selain Brazil, Colombia dan Meksiko) yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia (Alikodra, 1999). Terdapat 515 jumlah jenis mamalia, 1 519 jumlah jenis burung dan 601 jumlah jenis reptil serta lebih dari 100 spesies biji-bijian, akar-akaran, sagu atau tanaman penghasil gula yang digunakan masyarakat sebagai sumber karbohidrat. Selain itu terdapat 450 jenis spesies sebagai sumber vitamin dan mineral. Juga terdapat 70 spesies rempah-rempahan dan 40 spesies lainnya yang digunakan sebagai minuman. Masyarakat Indonesia juga memanfaatkan lebih dari 100 spesies tanaman berkayu untuk bangunan rumah dan konstruksi lainnya. Jenis-jenis flora-fauna tertentu di dunia yang hanya memiliki Indonesia misalnya; Melati-Jasminum Sambac, dan berbagai jenis bunga anggrek. Salah satu jenis anggrek tersebut yaitu anggrek bulan-Dendrobium Phalaenopsis, bunga Padma Raksasa-Rafflesia Arnoldi atau lebih dikenal dengan nama bunga bangkai atau bunga Rafflesia (sesuai dengan nama penemunya); hutan jati; biayak-komodo;

Anoa; burung Cendrawasih; Jalak Bali; burung Maleo; Kucing emas, dan masih banyak lagi.

Usaha pelestarian fauna dan flora atau pelestarian sumber daya alam hayati salah satunya dilakukan dengan mengadakan cagar alam, hutan lindung, taman nasional, dan taman laut. Pengadaan cagar alam itu ada yang bersifat botanis atau jenis tumbuh-tumbuhan, bersifat zoologis atau jenis binatang-hewan, dan yang menonjolkan keindahan alamnya (bersifat estetis). Perlindungan dunia fauna disebut suaka margasatwa, namun kenyataannya tidak ada pemisahan tegas, sebab dimana fauna dilindungi maka habitatnya yaitu berbagai flora dan alam sekitarnya dengan sendirinya ikut terlindungi.

Menurut Hughes (2002), kawasan lindung dengan beragam spesies di dalamnya yang disertai dengan perencanaan lingkungan memenuhi salah satu indikator sebagai taman nasional. Usaha-usaha pelestarian keanekaragaman hayati, antara lain dilakukan dengan menetapkan banyak Taman Nasional yang memiliki ciri khas masing-masing. Taman nasional sendiri berarti gabungan sistem dalam pengelolaan suaka alam, taman wisata, taman laut, sampai kepada pengelolaan hutan produksi dengan manajemen yang terpadu. Sampai saat ini, kawasan taman nasional yang telah diumumkan/ditunjuk di seluruh Indonesia sebanyak 36 lokasi dengan luas taman nasional sekitar 14,1 juta hektar yang terdiri dari 72,64% merupakan daratan dan 27,36% merupakan perairan laut.

Penanganan kawasan konservasi harus memperhatikan pencapaian tujuan ganda, yaitu: 1) perlindungan dan pengawetan secara mutlak terhadap tipe-tipe ekosistem dan keanekaragaman jenis, 2) pemanfaatan secara terkendali dari ekosistem dan keanekaragaman jenis sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat luas secara lestari (DITJEN PHPA 1986). Salah satu bentuk kawasan konservasi yang mempunyai tujuan ganda tersebut adalah Taman nasional. Dengan demikian Taman nasional adalah kawasan konservasi yang

dikelola secara terpadu. Artinya, semua tujuan perlindungan pengawetan dan pemanfaatan dapat ditampung dalam satu kesatuan (unit) pengelolaan. Menurut IUCN (2000), Taman nasional merupakan kawasan alam dari daratan atau lautan yang diarahkan untuk melindungi integritas satu atau lebih ekosistem bagi generasi sekarang dan yang akan datang; meniadakan eksploitasi yang membahayakan kawasan; menyediakan nilai pemanfaatan ilmiah, pendidikan dan rekreasi. Taman nasional merupakan asset sumber daya yang penting artinya bagi negara-negara tropis (Gossling 2002).

Taman nasional berbeda dengan Cagar Alam dan Suaka Margasatwa serta Hutan Wisata. Cagar Alam dan Suaka Margasatwa menitik beratkan pada tujuan utama yakni perlindungan dan pengawetan, sedangkan upaya pemanfaatan langsung terbatas sekali. Begitu pula dengan Hutan Wisata (Taman Wisata, Taman Baru, Taman Laut) yang mempunyai tujuan utama sebagai penyediaan tempat wisata alam. Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang disisihkan dengan tujuan utama untuk perlindungan tata air, agar keberadaan sistem penyediaan air dapat berlangsung terus menerus.

Pembangunan Taman nasional mempunyai azas pokok yang telah diterima pada kongres Taman nasional Sedunia ke III tahun 1982. Dua diantara beberapa azas pokok tersebut menyebutkan: pertama, bahwa Taman nasional harus memiliki sumberdaya alam yang khas dan unik baik flora, fauna, ekosistem, maupun gejala alam yang masih utuh dari asli. Kedua, memberikan kesempatan kepada pengembangan objek wisata alam, sehingga terbuka untuk umum dengan persyaratan khusus untuk pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, bina cinta alam dan rekreasi.

Kawasan Kerinci Seblat diusulkan sebagai taman nasional setelah dilakukan serangkaian survei ekstensif oleh pihak Ditjen PHPA dan FAO pada akhir tahun 1970. FAO membantu menyiapkan Rencana Pengelolaan Kawasan tersebut pada tahun 1981 dan dokumen tersebut selanjutnya

menjadi dasar bagi Departemen Kehutanan untuk menetapkan kawasan menjadi taman nasional.

Luas wilayah taman nasional 1,48 juta ha dan 30% diantaranya merupakan hutan pegunungan dan hutan dataran rendah (ketinggian kurang dari 1 000 m dpl). Selanjutnya banyak dilakukan revisi luas kawasan (antara tahun 1981 dan 1995) sehingga menjadikan luas taman nasional berkurang menjadi 996 500 ha, sehingga luas hutan dataran rendah seluruhnya. Wilayah hutan yang dikeluarkan dari taman nasional ini sebagian menjadi wilayah HPH di Jambi dan Bengkulu dan sebagian sisanya kembali dialokasikan menjadi wilayah taman nasional, sehingga luasnya sekarang menjadi 1 375 389,867 ha, sebagaimana ditetapkan dalam SK Menteri Kehutanan No.901/KPTS-II tahun 1999, tanggal 14 Oktober 1999. Kawasan Taman nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Kabupaten Kerinci seluas 215.000 ha.

Penetapan kawasan taman nasional terdiri dari 5 (lima) kriteria. Pertama, kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologi secara alami. Kedua, memiliki sumberdaya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami. Ketiga, memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh sebagai pariwisata alam. Keempat, memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan. Kelima, merupakan kawasan yang dapat dibagi kedalam zonasi inti, zona rimba, zona lain yang karena pertimbangan kepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitar kawasan, dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri.

Zona inti adalah bagian kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi, tidak boleh ada perubahan apapun yang disebabkan tindakan manusia. Zona inti (*sanctuary zone*) memiliki 6 (enam) kriteria. Pertama, mempunyai

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Kedua, mewakili formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunannya. Ketiga, mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan/atau tidak atau belum diganggu manusia. Keempat, mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami. Kelima, mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi. Keenam, mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya terancam punah.

Zona rimba (*wilderness zone*) adalah bagian kawasan Taman nasional yang melindungi zona inti dimana pembangunan fisik yang bersifat permanen tidak diperkenankan serta dapat dikunjungi secara terbatas. Zona ini mempunyai 3 (tiga) kriteria. Pertama, kawasan yang ditetapkan mampu mendukung upaya perkembangan dari jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasi. Kedua, memiliki keanekaragaman jenis yang mampu menyangga pelestarian zona inti dan zona pemanfaatan. Ketiga, merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu.

Zona pengembangan (*intensive use zone*) adalah bagian kawasan Taman nasional yang dikhususkan bagi pembangunan sarana prasarana untuk kemudahan dalam upaya pengelolaan dan menyediakan fasilitas pariwisata, khususnya wisata alam. Zona ini memiliki 3 (tiga) kriteria. Pertama, mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau berupa formasi ekosistem tertentu serta formasi geologinya yang indah dan unik. Kedua, mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam. Ketiga, kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

Pada Taman nasional yang terancam kelestariannya dapat dibentuk daerah penyangga (*buffer zone*). Daerah penyangga (*buffer zone*) sebagai suatu benteng yang melindungi sumberdaya alam di Taman nasional yang berasal dari luar dan dari dalam kawasan seperti gangguan terhadap satwa.

Permasalahan penduduk menyebabkan peningkatan laju pertumbuhan konsumsi. Meningkatnya laju konsumsi berarti meningkatnya kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa-jasa. Peningkatan konsumsi masyarakat akan barang publik seperti taman nasional yang tidak terkendali akan menimbulkan dampak negatif secara akumulatif terhadap lingkungan yang akhirnya menimbulkan *cost* yang tinggi bagi masyarakat.

Pesatnya pertumbuhan ekonomi di pulau Sumatera khususnya, menyebabkan besarnya tekanan terhadap TAMAN NASIONAL. Secara keseluruhan terdapat sebanyak 486 desa dan 10 HPH yang berbatasan dengan TAMAN NASIONAL. Di sana terdapat 36 kecamatan dengan jumlah penduduk 3,3 juta dari 4 (empat) propinsi yang berbatasan langsung dengan TAMAN NASIONAL (Barber et al. 1997). Dan sekitar 235 000 jiwa diantaranya hidup di 194 desa yang terletak berbatasan langsung dengan TAMAN NASIONAL. Pemenuhan kebutuhan yang cenderung meningkat tersebut dapat menimbulkan kecenderungan terjadinya perambahan sumberdaya hutan yang melampaui daya dukungnya (*open access*).

Pembukaan hutan primer yang berada dalam taman masih menjadi masalah yang serius. Berkembangnya perkebunan kayu manis dan kebun lainnya di Kerinci dan Sarolangun merupakan salah satu bentuk perambahan dalam skala besar. Kegiatan seperti ini disinyalir dibiayai oleh pihak-pihak tertentu yang memperkerjakan petani bagi hasil untuk mengelola kebun-kebun dimaksud. Kondisi ini ditunjang oleh baiknya pasaran kayu manis. Pemukiman-pemukiman kecil yang masih berada dalam taman dikuatirkan dapat menjadi

ancaman tersendiri untuk dimanfaatkan oleh pihak luar yang mendorong mereka melakukan praktek-praktek yang eksploratif.

Walaupun sudah ada batas taman yang jelas, pengumpulan hasil hutan seperti binatang dan tumbuhan secara illegal dari dalam hutan masih terus berlangsung. Kegiatan ini didorong oleh imbalan yang menarik dari pihak luar. Kegiatan illegal yang terjadi seperti pembalakan hutan dan pengumpulan hasil hutan lainnya berupa rotan manau dan gaharu.

Hak milik tanah yang mengikat menurut hukum dapat diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional, dan daerah-daerah yang digolongkan ke dalam tanah hutan tidak dapat dimiliki sama sekali. Oleh karenanya, hak milik menurut adat lemah. Lembaga yang mengatur penggunaan tanah dan hak milik tanah seperti marga secara hukum telah dibubarkan, sementara organisasi baru belum berjalan secara efektif. Oleh karena tidak ada peta dan pendaftaran yang seksama atas hak milik tanah adat, maka sengketa tanah sulit dihindarkan. Menurut hasil survei sosial ekonomi tahun 1993 atas enam desa perbatasan taman dilaporkan bahwa hak milik atas tanah mereka kurang diperhatikan. Di lain sisi masyarakat setempat menilai bahwa tanah mereka merupakan warisan dan anugerah dari Allah, sedangkan mereka tidak dapat memanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup. Kondisi demikian menjadikan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TAMAN NASIONAL.

## BAB III

# OTONOMI DAERAH

Dalam pasal 31 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya di kawasan pelestarian alam (seperti Taman nasional, Tahura) dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan untuk budaya dan wisata alam tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan.

Sedangkan kebijaksanaan pemerintah dalam pengembangan pariwisata-pariwisata alam di "kawasan konservasi" dalam kaitan dengan otonomi daerah mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa kewenangan bidang lain, termasuk konservasi tidak termasuk dalam kewenangan daerah. Daerah dalam undang-undang ini berwenang mengelola sumberdaya nasional yang terdapat di wilayahnya dan bertanggungjawab memelihara lingkungannya.

Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan daerah kabupaten dan kota tidak termasuk konservasi. Kewenangan propinsi dalam pasal 2 meliputi kebijaksanaan pendayagunaan sumberdaya alam serta konservasi, yang khusus berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan dan konservasi alam, antara lain penyelenggaraan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, penyelenggaraan izin usaha pemanfaatan perusahaan pariwisata alam lintas propinsi.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah juga menjadi salah satu acuan dalam pengembangan pariwisata alam. Dalam pasal 6 ayat 5 disebutkan bahwa penerimaan negara dari sektor kehutanan (apabila kawasan konservasi

dimasukkan dalam sektor kehutanan) dibagi dengan imbangannya 80% untuk daerah dan 20% untuk pemerintah pusat.

Dalam Undang-undang Otonomi jangan sampai kekuatiran sebagian kalangan bahwa di era otonomi kerusakan sumberdaya hutan semakin menjadi-jadi, dan masalah kehutanan yang berada di pusat pindah ke daerah. Target peningkatan pendapatan asli oleh daerah jangan sampai menjadikan pengelolaan sumberdaya alam seperti hutan dan sumberdaya alam lainnya menjadi terkuras. Sumberdaya alam hutan dapat saja dimanfaatkan, namun harus serasi dengan penggalan manfaat sosial dan lingkungan. Sebab, setiap pemanfaatan sumberdaya hutan yang terlalu mengeksploitasi sisi keuntungan ekonomi saja akan menimbulkan dampak negatif yang secara akumulatif berakibat tingginya "cost" yang bakal diterima masyarakat. Pengalaman masa lampau yang telah menimbulkan berbagai kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan harus dihindari. Target dan upaya mencari dan memenuhi daya pembangunan daerah jangan mengorbankan kelestarian lingkungan.

Dari sisi lain, semakin merosotnya sumberdaya alam dalam era otonomi khususnya berkaitan dengan sifat atau ciri yang melekat pada lingkungan alami itu sendiri, sehingga manusia berusaha mengeksploitasinya. Ciri atau sifat yang melekat pada sumberdaya alami itu terdiri: sifat/cirinya sebagai barang publik, sifat/cirinya sebagai barang milik bersama (*common proverty*) serta adanya eksternalitas. Eksternalitas muncul apabila kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam menimbulkan dampak pada orang lain, baik dalam bentuk manfaat maupun biaya eksternal yang semuanya tidak memerlukan kewajiban untuk menerima atau melakukan pembayaran. Oleh karena eksternalitas tidak diperhitungkan, maka manfaat eksternal akan dapat menjadi terlalu kecil dan biaya eksternal akan menjadi terlalu besar, lebih-lebih bila berbentuk biaya yang ditanggung oleh masyarakat.

Prinsip-prinsip lama pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan harus segera ditinggalkan karena sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan pembangunan yang menghendaki perubahan-perubahan ke arah perbaikan untuk menjamin tercapainya pembangunan daerah secara berkelanjutan. Prinsip-prinsip yang perlu dirombak adalah: bekerja pada kondisi keterbatasan data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan; pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang dicirikan dengan praktek-praktek monopolistik dan sentralistik; mengutamakan kepentingan ekonomi ketimbang kepentingan ekologi; pendekatan pembangunan yang bertumpu pada batas-batas administratif dengan mengabaikan batasan/unit ekologi; pembangunan yang kurang terkoordinasi dan tidak terintegritas dengan tujuan pengelolaan lingkungan hidup; kurang diperhatikannya fungsi-fungsi ekologi yang mendukung pembangunan, misalnya fungsi hutan mangrove, fungsi daerah resapan, fungsi terumbu karang, fungsi daerah rawa, fungsi lahan gambut, dsb.

Untuk mencegah kerusakan dan melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan, pemerintah daerah dalam hal ini harus memperhatikan berbagai faktor penentu yang berperan. Pertama, kemampuan sumberdaya manusia dan organisasi; kedua, perangkat aturan pelaksanaan termasuk norma dan batasan-batasannya; ketiga, kemampuan untuk melaksanakan segala peraturan (Alikodra 2000). Faktor-faktor penentu ini harus segera dipersiapkan untuk segera dapat menjalankan mandat otonomi secara profesional. Penyiapan faktor-faktor penentu memang membutuhkan konsentrasi dan biaya yang cukup mahal, namun jika diabaikan, maka sangat sulit bagi daerah untuk keluar dari akar permasalahan guna mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Diperlukan kebulatan tekad daerah bersama berbagai *stakeholders* untuk memobilisir seluruh kemampuan yang dimiliki dan menetapkan visi dan misi pembangunan daerah. Selanjutnya menjadi kewajiban kepala daerah menggerakkan

seluruh *stakeholders* untuk mewujudkan visi dan misi daerahnya melalui kebijakan, strategi dan program-programnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Peran DPRD sebagai wakil rakyat menjadi sangat penting dalam mencapai target pembangun daerah yang berwawasan lingkungan. Koordinasi dengan propinsi dan pemerintah pusat akan tetap diperlukan disamping untuk meningkatkan kemampuan institusi daerah dalam mengatasi permasalahan yang sifatnya lintas batas kabupaten/kota, juga untuk meningkatkan kemungkinan kerjasama dengan berbagai negara ataupun berbagai lembaga internasional.

Pengelolaan sumberdaya alam tidak terlepas para pengambil keputusan dibidang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Merekalah yang berperan untuk merubah kondisi sumberdaya alam dan lingkungan, apakah menjadi semakin rusak atau menjadi semakin baik. Oleh karena itu, sangat perlu untuk mengubah sikap dan perilaku mereka pada tingkat manapun agar tetap dalam koridor pembangunan daerah berwawasan lingkungan.

Menurut Suparmoko dan Suparmoko (2000), penetapan nilai penggunaan barang publik yang tidak memiliki pasar (*non existence of the market*) dilakukan dengan beberapa pendekatan: a) pendekatan pendapatan; b) pendekatan kesejahteraan; c) penghitungan fisik dan d) penghitungan moneter. Dalam pendekatan pendapatan yang dipentingkan adalah perubahan yang terjadi pada sumberdaya alam, namun tidak perlu melihat berapa banyak persediaan sumber daya alam yang ada. Akan tetapi pendekatan ini tidak melihat hubungan antara kesejahteraan dengan volume sumberdaya alam yang diambil sehingga dikuatirkan sumberdaya alam diambil terus menerus.

Melalui pendekatan kesejahteraan ingin diketahui berapa sesungguhnya volume persediaan sumberdaya alam yang ada di suatu tempat. Semakin banyak persediaan sumberdaya alam, makin sejahtera wilayah bersangkutan, sumberdaya

tersebut dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang. Pendekatan ini bagi pemerintah atau pengelola sumberdaya alam untuk menyesuaikan tingkat pengambilan sumberdaya alam sehingga terjadi keseimbangan antara sumberdaya alam yang ada dengan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi penghitungan persediaan sumberdaya alam relatif sulit.

Perhitungan secara fisik dapat membantu dilakukannya perencanaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Oleh karena sumberdaya alam merupakan faktor produksi bersama dengan faktor produksi lainnya dan masing-masing memiliki harga, akan menjadi lebih sempurna jika dilakukan nilai (*valuation*) terhadap sumberdaya sehingga dapat dijadikan prasyarat pembuatan neraca moneter sumberdaya alam.

Maksud penghitungan moneter adalah untuk disatukannya nilai penyusutan sumberdaya dan degradasi lingkungan ke dalam nilai Produk

## BAB IV

# PARIWISATA ALAM DAN AKULTURASI BUDAYA

Objek wisata alam yang unik dan khas akan menarik minat wisatawan untuk datang melakukan kunjungan wisata. Mereka dapat menikmati keindahan alam dan memperoleh pengalaman asli alami. Oleh karena wisatawan yang lazim disebut ekoturis melakukan perjalanan ke kawasan alam dengan penuh tanggungjawab terhadap lingkungan, maka pariwisata alam akan dapat menunjang upaya konservasi. Dalam implementasinya, pariwisata alam diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan konservasi dengan lingkungan yang dikembangkan dalam hubungan saling sinergi antara alam, penduduk dan wisatawan (Ross & Wall 1999). Wisatawan kategori ini tidak saja terbatas melakukan kegiatan pengamatan, melainkan ada yang melakukan penelitian. Artinya, pariwisata alam akan dapat mengembangkan penelitian, pendidikan dan latihan di objek pariwisata setempat. Dana yang diperoleh dari kegiatan pariwisata alam dapat dikembalikan untuk tujuan pengelolaan konservasi lingkungan fisik. Menurut Bjork (2000) peningkatan pengetahuan akan lingkungan yang disebabkan adanya hal yang unik dan khas di alam akan dapat menciptakan kesadaran hubungan timbal antara lingkungan yang bagus dengan ekonomi yang bagus.

Kegiatan pariwisata alam akan dapat menimbulkan proses akulturasi budaya terhadap kebudayaan itu sendiri serta interaksi yang terjadi antara kebudayaan-kebudayaan. Kebudayaan setempat akan semakin tumbuh dan berkembang karena semakin banyaknya wisatawan yang datang untuk mengetahui dan melihat kebudayaan asli tersebut. Bahkan akan dapat terjadi penggalian nilai-nilai budaya asli oleh masyarakat itu sendiri.

Pariwisata alam dapat menimbulkan gairah untuk meningkatkan serta mendorong kehidupan sosial dan budaya

masyarakat, meningkatkan partisipasi serta menimbulkan sikap keterbukaan tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur. Oleh Goodwin dan Roe (2001), dikemukakan bahwa pariwisata alam di sebuah taman nasional harus dapat merespon aspirasi dan memenuhi harapan untuk menjamin kehidupan masyarakat lokal sekitarnya berupa kesempatan kerja dan berusaha. Dan pada sisi lain, pariwisata alam akan dapat mendorong tetap terpeliharanya monumen-monumen kebudayaan, tempat bersejarah, seni tradisional, upacara dan pakaian adat.

Dari sisi sosial, pariwisata alam ikut berperan secara nyata menyadarkan masyarakat akan perlunya saling pertemuan yang dapat menimbulkan saling pengertian dalam segala aspek kehidupan yang pada akhirnya dapat memperluas ruang lingkup hubungannya dengan manusia lain. Pariwisata alam dapat meningkatkan kemajuan cara berpikir masyarakat.

Secara politik, pariwisata alam yang berlangsung dengan baik akan dapat meningkatkan hubungan perdamaian antar bangsa. Kunjungan wisata akan dapat membangun saling pengertian pada perbaikan tatanan hubungan antar bangsa, oleh karena adanya saling pengertian dan penghargaan antar personal yang menjelma menjadi hubungan antar bangsa.

Secara ekonomi pariwisata alam akan mendatangkan peningkatan pendapatan devisa negara dan pendapatan daerah, serta menciptakan kesempatan kerja/ berusaha bagi masyarakat sekitar lokasi pariwisata alam. Kegiatan pariwisata alam secara umum akan dapat mempengaruhi permintaan, penawaran, neraca pembayaran, ketenagakerjaan, pengeluaran, pembangunan dan lain sebagainya. Dengan kata lain, pariwisata alam akan dapat membantu dan menunjang gerak pembangunan, baik oleh karena penyediaan prasarana maupun penyediaan sarana pariwisata. Menurut Joppe (1996), perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah masyarakat setempat memang menerima suatu manfaat atau tidak karena adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

## BAB V

# KEMAJUAN EKONOMI LINGKUNGAN

Perekonomian di sini mengacu pada keadaan yang menunjukkan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam melakukan pilihan. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu tentang memilih diantara berbagai alternatif. Pembahasan ilmu ekonomi (*economics*) selalu berkaitan terutama dengan efisiensi dan alokasi sumber-sumber produktif yang langka (*scarcity*), dan dengan pertumbuhan yang optimal dari sumber-sumber itu untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang lebih besar. Sedangkan ekonomi pembangunan mempunyai ruang lingkup (*scope*) yang lebih luas dan kompleks (Suryana 2000). Ekonomi pembangunan juga berkaitan dengan formulasi kebijaksanaan pemerintah baik ekonomi maupun non ekonomi yang diantaranya dengan melibatkan variabel-variabel ekonomi makro secara langsung seperti *income*, investasi, kesempatan kerja (*employment*), dan gabungan faktor-faktor non ekonomi yang sama-sama relevan seperti alokasi sumberdaya yang efisien, perbaikan institusional, usaha-usaha perbaikan diri, nilai-nilai, sikap ekonomi dan politik pemerintah maupun swasta untuk mempercepat dan memperbesar skala tingkat hidup.

Dengan demikian, ekonomi pembangunan merupakan cabang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisis masalah yang dihadapi negara-negara sedang berkembang dan cara-cara untuk mengatasi masalah itu. Pembangunan ekonomi bukan saja terbatas pada suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang, melainkan suatu proses multidimensi yang melibatkan perubahan besar secara sosial dalam ekonomi. Pembahasan ilmu ekonomi pembangunan bersifat deskriptif dan analisis yang bertujuan

untuk memberikan gambaran tentang berbagai sifat perekonomian masyarakat di negara-negara sedang berkembang dan implikasinya serta kemungkinan untuk membangun ekonomi sebuah kawasan/negara. Pembahasan yang bersifat pilihan kebijaksanaan dapat dilakukan dalam usaha-usaha untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi di negara tersebut.

Ekonomi lingkungan adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memanfaatkan lingkungan sedemikian rupa sehingga fungsi/peranan lingkungan dapat dipertahankan atau bahkan dapat ditingkatkan dalam penggunaannya untuk jangka panjang (Suparmoko dan Suparmoko 2000). Lingkungan menurut Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23/1997 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan demi peningkatan kesejahteraan manusia, peranan lingkungan telah mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Bahan mentah yang disediakan lingkungan alami telah semakin berkurang dan menjadi langka. Kemampuan alam untuk mengolah limbah semakin berkurang karena terlalu banyaknya limbah yang harus ditampung dan melebihi daya dukungnya. Kemampuan alam menyediakan kesenangan dan kegembiraan juga semakin berkurang karena banyaknya sumberdaya alam dan lingkungan yang telah dirubah fungsinya atau oleh karena meningkatnya pencemaran.

## BAB VI

# PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT

Perekonomian masyarakat yang dimaksudkan sama dengan perekonomian rakyat. Ekonomi kerakyatan menurut Abimanyu (1999) lebih merupakan kata sifat, yakni memberdayakan (kelompok atau satuan unit) ekonomi yang tertinggal yang berskala kecil dan menengah. Ekonomi rakyat dapat dikotakan dengan satuan (usaha atau unit) ekonomi rakyat yang berskala kecil dan menengah.

Ekonomi kerakyatan mencakup lingkungan dan kelembagaan (bahkan sistem) yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kegiatan kelompok ekonomi yang tertinggal. Ekonomi kerakyatan berkeinginan untuk membangun kelembagaan atau sistem yang memberdayakan ekonomi rakyat. Kebijakan nyata bisa saja tidak dalam bentuk kredit murah atau subsidi kepada petani dan usaha kecil menengah. Keberpihakan kebijakan dapat berbentuk penciptaan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif, penyehatan rekapitulasi perbankan, atau undang-undang anti monopoli. Komitmen pemerintah untuk memperbaiki perbankan dan memprioritaskan pembenahan pada institusi bank dan finansial yang langsung berkaitan dengan rakyat kecil, merupakan salah satu upaya nyata menjalankan prinsip ekonomi kerakyatan.

Para pelaku ekonomi rakyat lemah posisinya dibandingkan dengan para pelaku ekonomi lainnya, sehingga keberadaan mereka dalam peta perekonomian menjadi marjinal. Persoalannya terkait dengan penguasaan teknologi, kepemilikan modal, akses ke pasar dan sumber-sumber informasi, serta keterampilan manajemen. Secara faktual, usaha kecil biasanya mempunyai skala usaha yang kecil dari sisi modal, penggunaan tenaga kerja, maupun orientasi pasarnya. Status usaha bersifat pribadi atau

kekeluargaan; tenaga kerja berasal dari lingkungan setempat; administrasi sangat sederhana; dan struktur modalnya sangat bergantung pada modal tetap.

Perekonomian rakyat dikelola secara tradisional dan terlepas dari perkembangan ekonomi modern berskala besar. Keadaan demikian pada gilirannya berakibat menimbulkan ketimpangan pendapatan yang dapat menghambat transformasi perekonomian menjadi ekonomi industri maju. Untuk itu, urgensi pemberdayaan ekonomi rakyat harus menjadi pilihan kebijakan yang tetap konsisten ditempuh oleh pemerintah.

Menurut Bobo (2003), pembangunan pada periode lalu lebih diprioritaskan pada peningkatan skala ekonomi daripada pemerataan dan hasil-hasilnya, dengan asumsi keuntungan yang diperoleh akan dengan sendirinya menetes ke bawah (*trickle down effect*) ke semua lapisan masyarakat. Perhatian khusus ditujukan pada pembentukan tabungan, investasi, modal dan teknologi guna meningkatkan skala ekonomi. Dalam kenyataannya, keadaan ini menjadikan partisipasi masyarakat menjadi lemah yang bermuara pada semakin lebarnya ketimpangan sosial ekonomi antar golongan masyarakat. Meminjam istilah lain, selayaknya perlu dilakukan pendekatan kompetitif-integratif dengan ciri penekanan lebih besar pada upaya pencapaian pemerataan untuk pertumbuhan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk penguasaan iptek guna meningkatkan nilai tambah produk ekonomi. Dengan pendekatan ini diharapkan secara bertahap akan dapat semakin meningkatkan daya saing nasional karena kuatnya ekonomi rakyat yang menopangnya; mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan pasar mereka.

Model pembangunan yang berbasis pada masyarakat sebagai intinya merupakan model pemberdayaan masyarakat yang berangkat dari partisipasi dan kekuatan masyarakat untuk kesejahteraan mereka. Implementasi kebijakan pembangunan semacam ini senantiasa berupaya mengentaskan kemiskinan. Meski demikian, perusahaan swasta besar dan BUMN tetap

mendapat tempat bahkan memiliki peran yang strategis tanpa meninggalkan prinsip profesionalisme dan efisiensi.

Pendapatan sektor formal yakni semua penghasilan berupa uang atau barang yang sifatnya reguler dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi dari sektor formal (Sumardi dan Evers 1982). Untuk pariwisata alam TNKS, pendapatan formalnya adalah semua pendapatan uang atau barang yang sifatnya reguler dan yang diterima sebagai balas jasa atau kontra prestasi dari sektor formal pariwisata alam tersebut.

Pendapatan uang meliputi: (a) gaji dan upah; dan (b) hasil investasi. Pendapatan berupa barang antara lain mencakup: (a) beras; (b) pengobatan; (c) transportasi; (d) perumahan dan (e) rekreasi. Menurut Sumardi dan Evers (1982), pendapatan sektor informal yakni segala penghasilan baik berupa uang atau barang yang diterima, biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi dari sektor informal. Pengertian ini akan sama dalam konteks pendapatan sektor informal pariwisata.

Dalam hubungannya dengan pendapatan informal pariwisata alam TNKS dimungkinkan banyak bermunculan usaha-usaha masyarakat baik karena memang permintaan aktual oleh wisatawan maupun oleh karena produk atau jasa yang potensial ditawarkan oleh masyarakat. Pembangunan sektor pariwisata kiranya harus mempunyai keterkaitan dengan pembangunan sektor lain di tempat lokasi pengembangan pariwisata tersebut dilakukan, seperti sektor pertanian, dimana masyarakat bersangkutan dapat menjual hasil-hasil usaha mereka, seperti produk-produk non timber kepada para wisatawan yang datang, misalnya hasil kerajinan dan sebagainya.

Menurut Todaro (1994), strategi pembangunan nasional ekonomi yang berlandaskan pada prioritas pertanian dan ketenagakerjaan seperti dalam konteks diatas, minimal harus memenuhi tiga unsur pelengkap dasar, yaitu: (1) percepatan pertumbuhan output melalui penyesuaian teknologi, kelembagaan, dan insentif harga yang dirancang khusus untuk meningkatkan produktivitas para petani kecil; (2) peningkatan

permintaan domestik terhadap output pertanian yang didasarkan pada strategi pembangunan perkotaan yang berorientasi pada ketenagakerjaan; dan (3) diversifikasi kegiatan pembangunan pedesaan padat karya non pertanian yang langsung atau non langsung yang ditunjang oleh masyarakat pertanian.

Agar pembangunan kepariwisataan dapat memberikan makna lebih berarti terhadap pendapatan masyarakat desa sekitar lokasi pengembangan, selayaknya kebijaksanaan pengembangan pariwisata mampu menjembatani dua hal pokok, yaitu: (1) faktor sumber kemajuan pertanian berskala kecil, dan (2) faktor syarat umum bagi kemajuan pedesaan.

Sumber kemajuan pertanian skala kecil, meliputi: (1) perubahan teknologi dan inovasi; (2) kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi yang tepat guna; dan (3) kelembagaan-kelembagaan sosial yang menunjang. Sedangkan syarat umum kemajuan pedesaan, menyangkut: (1) modernisasi struktur usaha tani untuk memenuhi permintaan bahan pangan yang meningkat; (2) menciptakan sistem penunjang yang efektif; dan (3) mengubah lingkungan pedesaan untuk memperbaiki tingkat kehidupan.

Menurut Anwar (1996), kebijaksanaan suatu pembangunan yang dilaksanakan dalam suatu program dan atau proyek adalah sebagai perwujudan kebijaksanaan pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat. Peningkatan produktivitas dan pendapatan di pedesaan memerlukan program terpadu yang mengarah pada perkembangan teknologi tepat guna seta pengembangan sumber daya manusia. Sasaran perubahan hendaknya rumah tangga yang terdiri dari pria, wanita dan anak yang sudah cukup dewasa untuk memberikan input tenaga kerja dalam proses produksi dan dalam kegiatan lain yang menghasilkan pendapatan.

Pendapatan dari suatu kegiatan produksi adalah total penerimaan dikurangi total biaya produksi. Untuk melihat apakah pendapatan yang diperoleh masyarakat desa berada di atas atau di bawah garis kemiskinan dapat dilakukan dengan perhitungan pendapatan per kapita masyarakat pada suatu kawasan tertentu.

---

Alat analisis yang digunakan adalah kriteria kemiskinan seperti: pendapatan per kapita yang disetarakan dengan kebutuhan hidup minimum setempat.

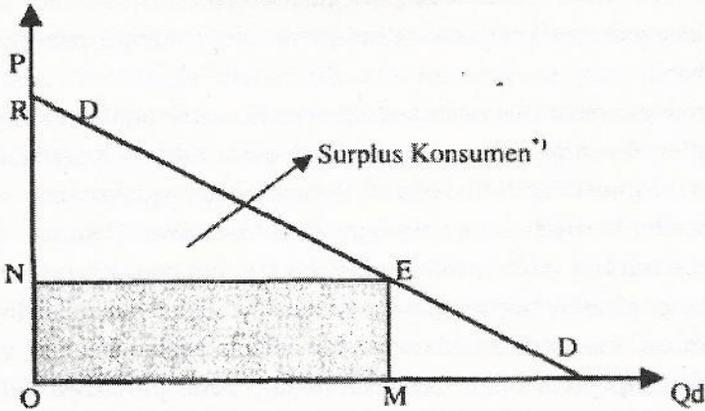
## BAB VII

# PENDEKATAN BIAYA PERJALANAN

### A. Valuasi Ekonomi

Secara umum dapat didefinisikan bahwa valuasi ekonomi pada dasarnya adalah suatu upaya untuk memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan terlepas dari apakah nilai pasar (market value) tersedia atau tidak (Susilowati, 2002). Akar dari konsep penilaian ini sebenarnya berdasarkan pada ekonomi neoklasikal (neoclassical economic theory) yang menekankan pada kepuasan atau keperluan konsumen. Berdasarkan pemikiran neoklasikal ini dikemukakan bahwa penilaian setiap individu pada barang dan jasa tidak lain adalah selisih antara keinginan membayar (willingness to pay = WTP), dengan biaya untuk mensuplai barang dan jasa tersebut. Surplus konsumen merupakan perbedaan antara jumlah yang dibayarkan oleh pembeli untuk suatu produk dan kesediaan untuk membayar (Samuelson dan Nordhaus, 1990). Surplus konsumen timbul karena konsumen menerima lebih dari yang dibayarkan dan bonus ini berakar pada hukum utilitas marginal yang semakin menurun. Sebab timbulnya surplus konsumen, karena konsumen membayar untuk tiap unit berdasarkan nilai unit terakhir. Surplus konsumen mencerminkan manfaat yang diperoleh karena dapat membeli semua unit barang pada tingkat harga rendah yang sama (Samuelson dan Nordhaus, 1990).

**Gambar 1**  
**Surplus Konsumen**



\*Total Surplus Konsumen adalah bidang di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga

Sumber : Djijono, 2002

Keterangan:

OREM = Total utilitas / kemampuan membayar konsumen

ONEM = Biaya barang bagi konsumen

NRE = Total Nilai surplus konsumen

Total economic Value (TEV) pada dasarnya sama dengan net benefit yang diperoleh dari sumber daya alam, namun didalam konsep ini nilai yang dikonsumsi oleh seorang individu dapat dikategorikan ke dalam dua komponen utama use value dan non-use value (Susilowati, 2002). Komponen pertama, yaitu use value pada dasarnya diartikan sebagai nilai yang diperoleh seorang individu atas pemanfaatan langsung dari sumber daya alam dimana individu berhubungan langsung dengan sumber daya alam dan lingkungan. Use value secara lebih rinci diklasifikasikan kembali kedalam direct use value dan indirect use value. Direct use value merujuk pada kegunaan langsung dari konsumsi sumber daya seperti penangkapan ikan, pertanian. Sementara indirect use value merujuk pada nilai yang dirasakan secara tidak langsung

kepada masyarakat terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan. Termasuk di dalam kategori *indirect use value* ini misalnya fungsi pencegahan banjir dan *nursery ground* dari suatu ekosistem (misalnya *mangrove*). Komponen kedua, *non-use value* adalah nilai yang diberikan kepada sumber daya alam atas keberadaannya meskipun tidak dikonsumsi secara langsung. *Non-use value* lebih bersifat sulit diukur (*less tangible*) karena lebih didasarkan pada preferensi terhadap lingkungan ketimbang pemanfaatan langsung. Secara detail kategori *non-use value* ini dibagi kedalam sub-class yaitu *existence value*, *Bequest value* dan *option value*. *Existence value* pada dasarnya adalah penilaian yang diberikan dengan terpeliharanya sumber daya alam dan lingkungan. *Bequest value* diartikan sebagai nilai yang diberikan oleh generasi kini dengan menyediakan atau mewariskan (*bequest*) sumber daya untuk generasi mendatang (mereka yang belum lahir). Sementara *option value* lebih diartikan sebagai nilai pemeliharaan sumber daya sehingga pilihan untuk memanfaatkan untuk masa yang akan datang tersedia. Nilai ini merujuk pada nilai barang dan jasa dari sumber daya alam yang mungkin timbul sehubungan dengan ketidakpastian permintaan di masa yang akan datang.

## **B. Pendekatan Biaya Perjalanan**

Konsep dasar dari metode *travel cost* adalah waktu dan pengeluaran biaya perjalanan (*travel cost expenses*) yang harus dibayarkan oleh para pengunjung untuk mengunjungi tempat wisata tersebut yang merupakan harga untuk akses ke tempat wisata (Garrod dan Willis, 1999). Itulah yang disebut dengan *willingness to pay (WTP)* yang diukur berdasarkan perbedaan biaya perjalanan. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan melalui metode *travel cost* menurut Garrod dan Willis (1999), yaitu:

1. Pendekatan Zona Biaya Perjalanan (A simple zonal travel cost approach), menggunakan data sekunder dan pengumpulan data dari para pengunjung menurut daerah asal.
2. Pendekatan Biaya Perjalanan Individu (An individual travel cost approach), menggunakan survei data dari para pengunjung secara individu. Penelitian dengan menggunakan metode biaya perjalanan individu (Individual Travel Cost Method) biasanya dilaksanakan melalui survey kuesioner pengunjung mengenai biaya perjalanan yang harus dikeluarkan ke lokasi wisata, kunjungan ke lokasi wisata yang lain (substitute sites), dan faktor-faktor sosial ekonomi (Suparmoko, 1997). Data tersebut kemudian digunakan untuk menurunkan kurva permintaan dimana surplus konsumen dihitung. Metode ini telah banyak dipakai dalam perkiraan nilai suatu taman rekreasi dengan menggunakan berbagai variabel (Suparmoko, 2000). Pertama kali dikumpulkan data mengenai jumlah pengunjung taman, biaya perjalanan yang dikeluarkan, serta faktor-faktor lain seperti tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan mungkin juga agama dan kebudayaan serta kelompok etnik dan sebagainya. Data atau informasi tersebut diperoleh dengan cara mewawancarai para pengunjung taman rekreasi tersebut mengenai jarak tempuh mereka ke lokasi taman rekreasi tersebut, biaya perjalanan yang dikeluarkan, lamanya waktu yang digunakan, tujuan perjalanan, tingkat pendapatan rata-rata, dan faktor sosial ekonomi lainnya.

### C. Permintaan dalam Kepariwisataan

Komoditi pariwisata adalah jasa, baik jasa-jasa yang disediakan berbagai jaringan industri kepariwisataan maupun berbagai fasilitas infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah sebagai "*public utility service*".

Permintaan dalam kepariwisataan bisa berupa wujud yang dapat diperoleh dengan gratis dan mempunyai daya tarik

kepariwisataan, yakni seperti jasa-jasa yang disediakan oleh alam (ciri *non exclusion* dan *non rivalry* dari suatu sumber daya). Akan tetapi pada keadaan lain, walaupun jasa kepariwisataan bersifat *common property*, untuk dapat menikmatinya perlu pengorbanan oleh wisatawan berupa karcis masuk, jasa akomodasi, biaya perjalanan atau pengorbanan waktu. Menurut Yoeti (1990), ciri-ciri permintaan pariwisata adalah: 1) terkonsentrasi menurut musim dan daerah tujuan, 2) elastisitasnya tinggi, dan 3) berubah-ubah sesuai dengan motivasi masing-masing individu.

Penentuan peubah yang mempengaruhi permintaan pariwisata (*independence variables*) didekati dengan pendekatan biaya perjalanan (*transportation cost*) terendah yang dicerminkan oleh kedekatan ruang (*space*) yang dihubungkan oleh prasarana dan sarana transportasi. Kemajuan transportasi berkaitan erat dengan perkembangan kebudayaan manusia. Menurut Kamaluddi (1987), transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang memperlihatkan tiga bagian penting yang terus dipenuhi, yaitu (a) ada wisatawan yang diangkut, (b) tersedia alat pengangkut, (c) ada jalan yang dapat dilalui.

Peranan ekonomi transportasi secara singkat adalah (a) merupakan jangkauan akan sumberdaya yang dibutuhkan oleh suatu daerah; (b) terjadinya pemakaian sumberdaya yang efisien sehingga menciptakan spesialisasi daerah; (c) barang-barang yang dapat disalurkan dari sumber alternatif lainnya. Dari segi sosial, transportasi dapat meningkatkan mobilitas penduduk dari dan ke suatu tempat karena mereka tidak terisolasi lagi. Di segi politik dan perencanaan, transportasi dapat memberikan kontribusinya, misalnya memberikan informasi atau secara ekstrim dikatakan memudahkan penguasaan wilayah oleh suatu pemerintahan.

Dengan demikian faktor transportasi dan jarak tempuh dari wilayah yang berhirarki tinggi-memiliki jenis dan jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang lebih banyak (Kota

Jambi) dan ke wilayah yang berhierarki lebih rendah (Kabupaten Kerinci) merupakan salah satu faktor yang dianggap besar pengaruhnya terhadap jumlah kunjungan wisatawan ke lokasi pariwisata TNKS. Faktor lainnya yang diduga ikut mempengaruhi seperti: intensitas pertunjukan atraksi wisata, tarif hotel, dan sebagainya.

Pendekatan biaya perjalanan berhubungan dengan tempat khusus dan mengukur nilai dari tempat tertentu. Pendekatan ini dikembangkan untuk menilai manfaat yang diperoleh konsumen dalam memanfaatkan barang lingkungan atau barang yang tidak memiliki nilai atau dinilai terlalu rendah (Hufschmidt 1992).

Untuk tempat rekreasi, kawasan yang mengelilinginya dibagi ke dalam zona konsentrasi dengan jarak makin jauh menunjukkan peringkat biaya tinggi. Survei terhadap tempat pemakai rekreasi dilakukan guna menentukan zona asal. Zonasi dibagi berdasarkan jarak ke lokasi wisata. Inti dari pendekatan ini adalah biaya perjalanan ke satu tempat rekreasi akan mempengaruhi jumlah kunjungan yang dilakukan oleh seseorang.

Dalam hal terdapat fenomena lain, misalnya konsumen sering tidak membayar karcis masuk, bukan merupakan indikator nilai tempat atau kesediaan riil membayar. Dengan pengertian di atas, maka semakin jauh tempat tinggal seseorang untuk datang memanfaatkan fasilitas suatu objek wisata, makin kurang harapan untuk memanfaatkan tempat tersebut.

Adapun beberapa asumsi yang digunakan dalam pendekatan biaya perjalanan adalah:

1. Semua pemakai memperoleh manfaat total sama terhadap manfaat rekreasi, dan ini sama dengan biaya perjalanan pemakai marjinal adalah nol.
2. Surplus konsumen pemakai marjinal adalah nol.
3. Biaya perjalanan merupakan data ganti harga.

4. Orang pada semua jarak akan mengkonsumsi dalam jumlah yang sama untuk biaya tertentu.

Atas dasar pendekatan Biaya Perjalanan (*Travel Cost Approach*) dikembangkan 2 (dua) model fungsi permintaan, yaitu: jumlah wisatawan nusantara (wisnu) dan wisatawan mancanegara (wisman) sebagai peubah terikat. Peubah bebas yang dianggap mempengaruhi jumlah kunjungan terdiri dari beberapa peubah, yakni: harga karcis masuk untuk wisnu dan wisman ( $P_t$  dan  $P_d$ ), pendapatan per kapita Kota Jambi ( $I_t$ ), biaya perjalanan rata-rata dari Kota Jambi dan Kota Padang ( $ATC_t$ ), tarif hotel/penginapan di Sungai Penuh Kabupaten Kerinci ( $W_t$ ), rata-rata jumlah mobil di Kota Jambi dan Kota Padang ( $Z_{1t}$ ), rata-rata frekuensi kedatangan pesawat ke Kota Jambi dan Kota Padang ( $Z_{2t}$ ), dan jumlah intensitas pertunjukan seni/budaya di lokasi pariwisata alam TNKS ( $Z_{3t}$ ) serta dummy krisis ekonomi sebelum 1997 dan setelah 1997 ( $D_{wt}$ ) yang diduga mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman).

#### D. Permintaan dan Penawaran (*Supply and Demand*)

Menurut wahab, (1988) penawaran pariwisata ditandai oleh 3 (tiga) ciri khas utama, yaitu: 1) penawaran jasa: 2) jasa yang ditawarkan itu bersifat kaku, artinya untuk pengadaannya sulit sekali mengubah sasaran penggunaannya di luar sektor pariwisata; 3) oleh karena pariwisata bukan sebagai kebutuhan pokok manusia, maka penawarannya harus bersaing ketat dengan barang dan jasa-jasa lainnya.

Unsur penawaran pariwisata terdiri dari sumber daya alam dan hasil karya manusia. Sumberdaya alam meliputi:

1. Iklim; udara lembut, sinar matahari, kering atau bersih.
2. Tata letak tanah dan pemandangan alam.
3. Unsur rimba; hutan lebat, pohon-pohon langka dan sebagainya.

4. Flora dan fauna; tumbuhan aneh, barang-barang beragam jenis dan warna, berburu, safari binatang buas, taman nasional, taman suaka binatang buas dan sebagainya.
5. Pusat-pusat kesehatan; sumber air mineral alam, kolam lumpur berkhasiat untuk mandi, sumber air panas alam untuk penyembuhan penyakit dan sebagainya.

Hasil karya manusia yang ditawarkan untuk pariwisata meliputi 5 (lima) kategori utama, yang terdiri dari:

1. Sesuatu yang berciri sejarah, budaya dan agama.
2. Prasarana.
3. Sarana transportasi penunjang, seperti pelabuhan udara, laut, transportasi darat (mobil), kereta api, sistem angkutan pegunungan dan sebagainya.
4. Sarana pelengkap seperti bioskop, warung dan sebagainya.
5. Pola hidup masyarakat, seperti adat istiadat dan lain-lain.

Permintaan wisata dapat dibagi atas permintaan yang potensial dan nyata. Permintaan potensial biasanya terdiri dari mereka yang telah memiliki uang untuk kegiatan wisata (siap untuk berpergian) namun belum ada waktu. Sedangkan permintaan aktual adalah mereka yang telah nyata berpergian ke suatu kawasan tujuan wisata. Dengan asumsi kelebihan pendapatan, situasi sosial politik dan lain-lain tetap sama, maka semakin banyak jumlah penduduk di negara sumber wisatawan semakin banyak jumlah wisatawan pergi melakukan kegiatan wisata. Dari sisi negara atau daerah tujuan wisata, faktor kemudahan mencapai lokasi (*accessibility*) tetap berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan.

Beberapa ciri khas permintaan wisata dikemukakan oleh Wahab (1988), yaitu pertama elastis. Kepekaan (*elastisitas*) harga merupakan suatu faktor yang erat kaitannya dengan perilaku wisatawan. Wisatawan yang kaya belum tentu gampang mengeluarkan uang. Kedua, sensitivitas; dimana permintaan wisata sangat peka terhadap perubahan mode

perjalanan. Daerah wisata yang tidak stabil keamanannya tidak akan menarik wisatawan untuk mengunjunginya. Ketiga, ekspansi. Terjadinya ekspansi lantaran beberapa faktor seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, media informasi, membaiknya keadaan ekonomi di negara asal wisatawan dan lain-lain. Keempat, musim (*seasonal*). Pengaruh iklim sangat besar bagi wisatawan untuk melakukan kegiatan wisata. Pada keadaan tertentu, terkadang jumlah kunjungan wisatawan sangat besar pada musim tertentu.

## BAB VIII

# PARIWISATA MENINGKATKAN EKONOMI

Menurut Hoover (1977), ilmu ekonomi wilayah atau ilmu ekonomi regional merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempunyai tata ruang yang berhubungan dengan pertanyaan apa, dimana, mengapa serta bagaimana selanjutnya. Pertanyaan "apa" dan "dimana" berhubungan dengan setiap macam aktivitas ekonomi yang tidak hanya berupa pembangunan dalam ruang lingkup yang sempit dari pabrik-pabrik, usaha pertanian, tetapi termasuk pembangunan dari segala macam usaha, rumah tangga dan lembaga-lembaga pemerintah serta swasta. Sedangkan pertanyaan "dimana" berhubungan dengan lokasi yang dikaitkan dengan aktivitas ekonomi lainnya, seperti dekat/tidaknya lokasi, pemusatan dan penyebaran dari suatu lokasi seta kesamaan atau ketidak seimbangan pola-pola tata ruang yang berlanjut pada pembahasan yang lebih luas seperti: antar daerah, luas daerah, daerah tetangga dan tempat-tempat tinggal (*site*). Sedangkan pertanyaan "mengapa" dan "bagaimana selanjutnya" berhubungan dengan batas-batas kesanggupan ahli ekonomi untuk menjawabnya.

Menurut Losch dalam Hoover (1997), dalam hal semua sumber alam berlainan, dianggap dikandung dalam satu daerah didasarkan atas perkiraan 3 (tiga) anggapan. Pertama, akan terdapat pemusatan semua aktivitas pada satu tempat. Kedua, akan terdapat penyebaran secara merata dari semua aktivitas keseluruh daerah (terdapat *homogenitas*). Ketiga, sama sekali tidak ada pola sistematis, tetapi akan terdapat suatu aktivitas yang tersebar dengan cara terpencar-pencar. Artinya, Losch dengan model abstraknya menganggap hanya ada 2 (dua) faktor pembatas yang menentukan lokasi, yaitu: 1) penghematan-pemusatan tata ruang, dan 2) biaya pengangkutan.

Sebagai kesimpulan, pengertian atas masalah-masalah ekonomi daerah dan tata ruang dapat dimasukkan ke dalam 3 (tiga) faktor nyata kehidupan. Pertama, keuntungan sumber-sumber alam (*natural resources advantages*); kedua, penghematan-penghematan dari pemusatan-pemusatan (*economies of concentration*); dan ketiga, biaya pengangkutan dan perhubungan. Secara lebih teknis, 3 (tiga) fundamental itu dapat dinyatakan sebagai mobilitas faktor-faktor yang tidak sempurna, divisibilitas secara sempurna dan mobilitas barang-barang dan jasa-jasa yang tidak sempurna.

#### A. Laju Pembangunan Ekonomi

Untuk mengetahui laju pembangunan ekonomi suatu daerah dan perkembangan tingkat kesejahteraannya, perlu diketahui tingkat pendapatan daerah dan besarnya pendapatan per kapita. Besarnya pendapatan daerah akan menentukan besarnya pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita akan memberi gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat, sedangkan besarnya pendapatan per kapita sangat erat kaitannya dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk. Apabila pertambahan pendapatan suatu daerah lebih besar dari pertambahan penduduknya, maka tingkat pendapatan per kapita penduduk akan meningkat, demikian pula sebaliknya. Tingkat kesejahteraan relatif dapat dicapai apabila tingkat pertambahan pendapatan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Pendapatan per kapita akan mengalami kenaikan jika produktivitas per kapita juga naik. Peningkatan produktivitas memerlukan adanya perubahan struktur ekonomi, struktur produksi, teknik produksi dan masyarakatnya berkembang menjadi dinamis. Dengan kata lain, akan terdapat kemajuan ekonomi apabila terjadi kenaikan pendapatan daerah dan pendapatan per kapita yang diikuti oleh perubahan struktur ekonomi, teknik produksi, modernisasi, dan masyarakat

tradisional berkembang menjadi dinamis yang berpikir rasional ekonomis (Suryana 2000).

## B. Faktor-Faktor Penyebab Pertumbuhan Daerah

Pertumbuhan dan perubahan daerah melibatkan hubungan-hubungan sesama aktivitas diantara perekonomian daerah dengan analisis-analisis yang mencakup cara-cara yang dapat mendorong suatu perubahan atau suatu aktivitas daerah kepada daerah lainnya. Menurut Hoover (1997), faktor-faktor penyebab pertumbuhan daerah dengan teori pembangunan menekankan pada perubahan bebas (*independent*), baik yang berasal dari luar (*exogeneous*), dari yang mendasar (*primary*) maupun yang berasal dari perubahan yang lainnya (*causal*). Permintaan "ekstern" untuk suatu ekspor daerah dan penawarannya seperti: buruh dan faktor-faktor lainnya dipandang sebagai faktor perubahan yang utama.

Berbagai macam rangkaian aktivitas diantara perusahaan-perusahaan dan aktivitas lainnya dalam suatu daerah membantu menjelaskan pengaruh dari berbagai sifat dan reaksi yang berantai dan kumulatif. Rangkaian aktivitas vertikal dan komplementer memiliki pengaruh yang berasal dari kekuatannya sendiri. Perubahan awal pada tingkat aktivitas di suatu daerah, seterusnya cenderung untuk tetap menghasilkan perubahan pada arah yang sama dan mengakibatkan berbagai aktivitas yang lebih luas lagi.

Aktivitas-aktivitas dalam sebuah daerah selalu bersaing untuk mendapatkan input-input lokal yang langka (seperti tanah, tenaga kerja). Terutama dalam jangka pendek, maka peningkatan permintaan atas input ini akan meningkatkan biaya input-input tersebut.

Jika melihat segi permintaan dalam konteks pertumbuhan daerah, pertama-tama pendekatan akan menekankan pada rangkaian aktivitas yang mengarah ke belakang (*backward linkages*) diantara berbagai aktivitas itu. Rangkaian semacam itu merupakan bentuk permintaan suatu

output daerah yang menimbulkan permintaan untuk aktivitas lainnya. Dari sudut penawaran, penyebab pertumbuhan daerah dapat ditelusuri dengan pertanyaan: darimana input produksi itu berasal dan dengan cara bagaimana penawaran (misalnya sumber mineral, tenaga kerja) menimbulkan penawaran yang dapat mengakibatkan suatu penawaran di suatu daerah. Jenis pendekatan ini akan menekankan pada rangkaian aktivitas yang mengarah ke muka (*forward linkages*).

## **BAB IX**

# **PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI INDUSTRI PARIWISATA DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH**

Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 memuat baik cita-cita, dasar-dasar, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan negara. Cita-cita pembentukan negara kita kenal dengan istilah tujuan nasional yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) memajukan kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sektor pariwisata yang sudah mendunia dan menyedot banyak wisatawan mancanegara bahkan lintas negara, juga pada akhirnya mampu menjadi duta bangsa yang mengabarkan pada dunia, eksistensi Bangsa dan Negara Indonesia. Menjadi duta kepada dunia dan mengabarkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka, aman, kondusif, maju dan sejahtera. Sektor pariwisata ini dapat memberi gambaran wajah Indonesia kepada dunia internasional.

Pariwisata di era otonomi daerah adalah wujud dari cita-cita Bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Memajukan kesejahteraan umum dalam arti bahwa pariwisata jika di kelola dengan baik, maka akan memberikan kontribusi secara langsung pada masyarakat di sekitar daerah pariwisata, terutama dari sektor perekonomian. Secara tidak langsung pariwisata memberikan kontribusi signifikan kepada PAD suatu daerah dan tentu saja pemasukan devisa bagi suatu negara.

Akibat langsung yang timbul dari pemberian otonomi daerah adalah adanya daerah basah dan daerah kering. Hal ini disebabkan potensi dan kondisi masing-masing daerah di Indonesia tidak sama. Daerah yang kaya akan sumber daya alam otomatis menjadi daerah basah seiring dengan bertambahnya perolehan PAD-nya dari sektor migas misalnya, sedangkan daerah yang minus sumber daya alam otomatis menjadi daerah kering. Namun demikian tidak berarti daerah yang miskin dengan sumber daya alam tidak dapat meningkatkan PAD-nya, karena jika dicermati ada beberapa potensi daerah yang dapat digali dan dikembangkan dari sektor lain seperti sektor pariwisata.

Dalam lingkup nasional, sektor pariwisata dianggap sebagai sektor yang potensial di masa yang akan datang. Menurut analisis World Travel and Tourism Council (WTTC), industri pariwisata menyumbang 9,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada saat ini dan diperkirakan pada tahun 2007 akan meningkat menjadi 10,1%. Jumlah perjalanan wisatawan mancanegara (wisman) di Indonesia pada tahun 2004 mengalami pertumbuhan sebesar 19,1% dibanding tahun 2003. Sedangkan penerimaan devisa mencapai US\$ 4,798 miliar, meningkat 18,8% dari penerimaan tahun 2003 sebesar US\$ 4,037 miliar.

Berdasarkan catatan sementara dari Biro Pusat Statistik, jumlah wisman ke Indonesia pada tahun 2005 berjumlah 5,007 juta atau mengalami penurunan sebesar 5,90%. Penerimaan devisa diperkirakan mencapai US\$ 4,526 miliar atau mengalami penurunan sebesar 5,66% dibanding tahun 2004. Namun demikian angka perjalanan wisata di dalam negeri (pariwisata nusantara) tetap menunjukkan pertumbuhan yang berarti. Di tahun 2005 diperkirakan terjadi 206,8 juta perjalanan (trips) dengan pelaku sebanyak 109,9 juta orang dan menghasilkan pengeluaran sebesar Rp 86,6 Triliun. Keseluruhan angka tersebut di atas, mencerminkan kemampuan pariwisata dalam meningkatkan pendapatan negara, baik dalam bentuk devisa asing maupun perputaran uang di dalam negeri.

Berdasarkan analisis tersebut wajar jika industri pariwisata di Indonesia dinilai sebagai sektor andalan penyumbang devisa negara terbesar dalam bidang nonmigas. Terlebih ketika pemerintah Indonesia mencanangkan program otonomi daerah, maka industri pariwisata merupakan salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan daerah.

Yang perlu mendapat perhatian bahwa pengembangan industri pariwisata daerah terkait dengan berbagai faktor yang mau tidak mau berpengaruh dalam perkembangannya. Oleh karena itu perlu diketahui dan dipahami apa saja faktor-faktor yang secara faktual memegang peranan penting dalam pengembangan industri pariwisata daerah khususnya dalam rangka penerapan otonomi daerah, sehingga pada akhirnya pengembangan industri pariwisata daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi peningkatan PAD dan mendorong program pembangunan daerah.

Ada beberapa isu strategis (politik, ekonomi, sosial dan budaya) yang terkait dengan pariwisata di era otonomi daerah yaitu: pertama dalam masa penerapan otonomi daerah di sektor pariwisata adalah timbulnya persaingan antar daerah, persaingan pariwisata yang bukan mengarah pada peningkatan komplementaritas dan pengkayaan alternatif berwisata. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti:

- a. Lemahnya pemahaman tentang pariwisata
- b. Lemahnya kebijakan pariwisata daerah
- c. Tidak adanya pedoman dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Akibatnya pengembangan pariwisata daerah sejak masa otonomi lebih dilihat secara parsial. Artinya banyak daerah mengembangkan pariwisatanya tanpa melihat, menghubungkan dan bahkan menggabungkan dengan pengembangan daerah tetangganya maupun propinsi/kabupaten/kota terdekat. Bahkan cenderung meningkatkan persaingan antar wilayah, yang pada akhirnya akan berdampak buruk terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Padahal pengembangan pariwisata seharusnya lintas

Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota, bahkan tidak tidak lagi mengenal batas karena kemajuan teknologi informasi.

Isu kedua terkait dengan kondisi pengembangan pariwisata Indonesia yang masih bertumpu pada daerah tujuan wisata utama tertentu saja, walaupun daerah-daerah lain diyakini memiliki keragaman potensi kepariwisataan. Hal yang mengemuka dari pemusatan kegiatan pariwisata ini adalah dengan telah terlampauinya daya dukung pengembangan pariwisata di berbagai lokasi, sementara lokasi lainnya tidak berkembang sebagaimana mestinya.

Selain itu kekhasan dan keunikan atraksi dan aktivitas wisata yang ditawarkan masih belum menjadi suatu daya tarik bagi kedatangan wisatawan mancanegara, karena produk yang ditawarkan tidak dikemas dengan baik dan menarik seperti yang dilakukan oleh negara-negara pesaing. Salah satu kelemahan produk wisata Indonesia, yang menyebabkan Indonesia kalah bersaing dengan negara-negara tetangga adalah kurangnya diversifikasi produk dan kualitas pelayanan wisata Indonesia. Para pelaku kepariwisataan Indonesia kurang memberikan perhatian yang cukup untuk mengembangkan produk- produk baru yang lebih kompetitif dan sesuai dengan selera pasar.

Isu ketiga berhubungan dengan situasi dan kondisi daerah yang berbeda baik dari potensi wisata alam, ekonomi, adat budaya, mata pencaharian, kependudukan dan lain sebagainya yang menuntut pola pengembangan yang berbeda pula, baik dari segi cara atau metode, prioritas, maupun penyiapannya. Proses penentuan pola pengembangan ini membutuhkan peran aktif dari semua pihak, agar sifatnya integratif, komprehensif dan sinergis.

Isu keempat dapat dilihat dari banyaknya daerah tujuan wisata yang sangat potensial di Indonesia apabila dilihat dari sisi daya tarik alam dan budaya yang dimilikinya. Namun sayangnya belum bisa dijual atau mampu bersaing dengan daerahdaerah tujuan wisata baik di kawasan regional maupun internasional. Hal tersebut semata-mata karena daya tarik yang tersedia belum dikemas secara profesional, rendahnya mutu pelayanan yang

diberikan, interpretasi budaya atau alam yang belum memadai, atau karena belum dibangunnya citra (image) yang membuat wisatawan tertarik untuk datang mengunjungi dan lain sebagainya.

Memperbanyak variasi produk baru berbasis sumber daya alam, dengan prinsip pelestarian lingkungan dan partisipasi masyarakat, merupakan strategi yang ditempuh untuk meningkatkan pemanfaatan keunikan daerah dan persaingan di tingkat regional dengan daerah lain. Selain kualitas kemasan dan pelayanan, produk pariwisata berbasis alam harus memberikan pengalaman lebih kepada wisatawan. Selanjutnya, pengemasan produk wisata dan pemasarannya, haruslah memanfaatkan teknologi terkini. Produk-produk wisata yang ditawarkan harus sudah berbasis teknologi informasi, sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan sekaligus meningkatkan kemampuan pariwisata daerah menembus pasar internasional.

Sebagai konsekuensi untuk menjawab tantangan isu dan mencapai tujuan-tujuan besar tersebut, daerah-daerah harus melakukan inovasi, kreasi dan pengembangan-pengembangan terhadap potensi-potensi pariwisata masing-masing daerah dengan mencari dan menciptakan peluang-peluang baru terhadap produk-produk pariwisata yang diunggulkan.

Membicarakan industri pariwisata tentunya juga tidak terlepas dari membicarakan batasan pengertian pariwisata itu sendiri. Pengertian istilah "Pariwisata" perlu dikemukakan karena istilah tersebut tidak selalu memberikan arti maupun ruang lingkup yang sama.

Menurut definisi yang bersifat umum, pariwisata adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus, dan melayani kebutuhan wisatawan. Pariwisata berarti perpindahan orang untuk sementara (dan) dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat di mana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan mereka selama tinggal di tempat tujuan-tujuan itu.

Menurut ketentuan perundangan di Indonesia yang dimaksud dengan pariwisata adalah "segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk perusahaan-perusahaan obyek dan daya tarik wisata beserta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut".

Pariwisata sebagai industri atau lebih dikenal dengan istilah "Industri Pariwisata" belum dijumpai batasan pengertiannya dalam peraturan perundangan di Indonesia. Namun demikian para ahli kepariwisataan telah merumuskan pengertian tentang industri pariwisata.

Industri pariwisata adalah keseluruhan rangkaian dan usaha menjual barang dan jasa yang diperlukan wisatawan, selama melakukan perjalanan wisata sampai kembali ketempat asalnya. Industri pariwisata dalam pengertian yang lain ialah industri yang berupa seluruh kegiatan pariwisata yang utuh.

Dari batasan pengertian tersebut di atas dapat dirumuskan bahwa pariwisata sebagai industri di sini dapat dipahami dengan memberikan gambaran mengenai komponen-komponen kepariwisataan dalam industri tersebut yang saling terkait satu dengan yang lain. Jadi komponen-komponen kepariwisataan tersebut tidak dapat berdiri sendiri, namun merupakan rangkaian jasa yang kait mengait yang dihasilkan industri-industri lain misalnya: industri kerajinan, perhotelan, angkutan dan lain sebagainya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa industri pariwisata mempunyai ciri-ciri khusus. Adapun ciri-ciri khusus mengenai industri pariwisata yaitu sebagai berikut:

- a. Produk pariwisata tidak dapat disimpan atau dipindahkan;
- b. Permintaan akan produk pariwisata sangat tergantung pada musim (*highly seasonal*);
- c. Permintaan dipengaruhi oleh faktor luar dan pengaruh yang tidak dapat atau sulit diramalkan (*unpredictable influences*). Misalnya, perubahan dalam nilai kurs valuta, ketidakstabilan politik, dan perubahan cuaca dapat mempengaruhi permintaan;

- d. Permintaan tergantung pada banyak motivasi yang rumit. Ada lebih dan satu alasan mengapa para wisatawan mancanegara melakukan perjalanan ke luar negeri;
- e. Pariwisata sangat elastis akan harga dan pendapatan. Permintaan sangat dipengaruhi oleh perubahan yang relatif kecil dalam harga dan pendapatan. Kalau harga atau pendapatan naik atau turun perubahan tersebut sangat mempengaruhi konsumsi jasa-jasa pariwisata.

Bagi Indonesia, industri pariwisata merupakan suatu komoditi prospektif yang di pandang mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, sehingga tidak mengherankan apabila Indonesia menaruh perhatian khusus kepada industri pariwisata. Hal ini lebih diperkuat dengan adanya kenyataan bahwa Indonesia memiliki potensi alam dan kebudayaan yang cukup besar yang dapat dijadikan modal bagi pengembangan industri pariwisatanya. Salah satu tujuan pengembangan kepariwisataan di Indonesia adalah untuk meningkatkan pendapatan devisa khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri-industri penunjang dan industri-industri sampingan lainnya.

Di Indonesia pengembangan industri pariwisata masuk dalam skala prioritas khususnya bagi daerah-daerah yang miskin akan sumber daya alam. Sesuai dengan pernyataan International Union of Official Travel Organization (IUOTO) dalam konferensi di Roma tahun 1963 bahwa pariwisata adalah penting bukan saja sebagai sumber devisa, tapi juga sebagai faktor yang menentukan lokasi industri dan dalam perkembangan daerah-daerah yang miskin dalam sumber-sumber alam. Ini menunjukkan bahwa pariwisata sebagai industri jasa mempunyai andil besar dalam mendistribusikan pembangunan ke daerah-daerah yang belum berkembang.

Dalam orde reformasi ini, merupakan momentum awal yang sangat tepat bagi daerah untuk lebih mandiri dalam menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya.

Kemandirian daerah ini terwujud dalam pemberian kewenangan yang cukup besar meliputi kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama.

Penyerahan kewenangan tersebut disertai juga dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Merupakan konsekuensi logis bagi daerah dengan adanya penerapan otonomi daerah maka segala sesuatu yang bersifat operasional dilimpahkan kepada daerah.

Sehubungan dengan penerapan otonomi daerah maka segala sesuatu yang menyangkut pengembangan industri pariwisata meliputi pembiayaan, perizinan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi menjadi wewenang daerah untuk menyelenggarakannya. Dengan demikian masing-masing daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam mengembangkan obyek dan potensi wisatanya, termasuk pembiayaan promosinya.

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi berasal dan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dan dalam wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dilihat dari sisi PAD maka ada beberapa daerah di Indonesia yang miskin akan sumber daya alam sehingga tidak dapat mengandalkan PAD-nya dari hasil sumber daya alam. Oleh karenanya pengembangan industri pariwisata suatu daerah menjadi alasan utama sebagai salah satu upaya meningkatkan PAD melalui pemanfaatan potensi-potensi daerah setempat.

Pada tahun 1997, industri pariwisata Indonesia diperkirakan menghasilkan pajak tidak langsung sejumlah 8,7% dari keseluruhan nilai pajak tidak langsung dan pada tahun 2007

meningkat sebesar 9,6% dari total keseluruhan. Data tersebut menunjukkan bahwa industri pariwisata Indonesia memberikan kontribusi yang cukup besar di bidang perpajakan.

Sektor pajak mempunyai peranan penting dalam budget negara. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin negara, juga dipergunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Oleh karenanya, kontribusi pajak bagi pembangunan diharapkan tidak saja mendorong pembangunan satu wilayah saja, akan tetapi juga dapat mendorong pembangunan secara merata sampai di daerah-daerah terpencil di Indonesia.

Dalam ruang lingkup daerah, kontribusi industri pariwisata di bidang perpajakan diharapkan semakin meningkat dengan jalan melakukan pengembangan dan pendayagunaan potensi-potensi pariwisata daerah. Hanya saja pungutan pajak tersebut harus dilakukan secara bijaksana, artinya pungutan pajak harus tetap berpegang pada prinsip keadilan, kepastian hukum dan kesederhanaan. Dalam menuju kemandirian daerah, potensi industri pariwisata daerah yang dikelola dan dikembangkan dengan baik akan meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan. Dalam hal ini kontribusi pajak dan industri pariwisata daerah selain sebagai sumber PAD, juga dimaksudkan untuk membiayai pembangunan daerah.

Pada dasarnya pengembangan industri pariwisata suatu daerah berkaitan erat dengan pembangunan perekonomian daerah tersebut. Dampak positif yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat daerah setempat adalah adanya perluasan lapangan kerja secara regional. Ini merupakan akibat dari industri pariwisata yang berkembang dengan baik. Misalnya dengan dibangunnya sarana prasarana di daerah tersebut maka tenaga kerja akan banyak tersedot dalam proyek-proyek seperti pembangkit tenaga listrik, jembatan, perhotelan dan lain sebagainya.

Untuk mengembangkan industri pariwisata suatu daerah diperlukan strategi-strategi tertentu maupun kebijakan-kebijakan baru di bidang kepariwisataan. Sebuah gagasan menarik dari Sri Sultan HB X yang menyodorkan konsep kebijakan pariwisata borderless, yaitu suatu konsep pengembangan pariwisata yang tidak hanya terpaku pada satu obyek untuk satu wilayah, sedangkan pola distribusinya harus makin dikembangkan dengan tidak melihat batas geografis wilayah.

Gagasan tersebut memberi angin segar bagi dunia kepariwisataan di Indonesia terlebih dengan diterapkannya sistem otonomi daerah. Paling tidak kebijakan baru tersebut menjadi salah satu alternatif yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan dan mendayagunakan potensi-potensi wisata daerah melalui program kerjasama antar daerah. Namun demikian yang perlu mendapat perhatian di sini bahwa penerapan program kerjasama tersebut jangan sampai menimbulkan konflik yang justru berdampak merugikan, sehingga tujuan dan pengembangan pariwisata daerah menjadi tidak tercapai.

## BAB X

### PENUTUP

Pariwisata alam telah memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat sekitarnya, walaupun kesempatan kerja dan berusahanya relatif masih rendah. Namun demikian perlu dikemukakan bahwa kegiatan pariwisata masih merupakan kegiatan yang relatif kecil.

Secara deskriptif dampak positif pariwisata alam terhadap masyarakat sekitarnya lebih besar dibandingkan dengan dampak negatifnya. Dalam bobot yang relatif kecil, dampak negatif terjadi jika sebagian remaja meniru-niru cara berpakaian wisatawan yang belum tentu cocok dengan tata nilai yang berlaku ditengah masyarakat.

Pariwisata alam memberikan dampak positif dalam menunjang upaya konservasi dan meningkatkan perlindungan terhadap flora dan fauna. Dampak negatif lingkungan relative masih rendah, yakni apabila kenyamanan satwa tertentu terganggu oleh suara wisatawan, bunyi radio, alat-alat musik dan sebagainya.

Pendapatan sektor informal pariwisata alam dapat lebih ditingkatkan apabila kepada mereka diberikan insentif, paket bimbingan/ penyuluhan dan pelatihan, bantuan teknis dan kemudahan memperoleh modal usaha dari instansi/ lembaga terkait.

Peningkatan pendapatan/penyerapan tenaga kerja sektor informal pariwisata alam secara tidak langsung dapat ditempuh melalui modifikasi jasa wisata dengan jenis wisata lainnya, seperti penyatuan paket perjalanan wisata ke taman nasional lainnya.

Untuk mengurangi dampak negatif sosial/budaya pariwisata alam, dapat dilakukan program penyuluhan antara lain dengan pemutaran audio vidio tentang adat istiadat

masyarakat setempat kepada wisatawan atau dikemas dalam bentuk brosur.

Untuk menunjang upaya konservasi, pemutaran film-film lingkungan alami dan/ atau perluasan kegiatan *visit to school* diharapkan dapat menjadi program yang rutin.

Peningkatan dampak positif pariwisata alam terhadap ekonomi Kabupaten secara tidak langsung dapat ditempuh melalui peningkatan investasi pengelolaan dengan pola kemitraan dalam kendali manajemen lingkungan.

Pengelolaan secara terpadu dan sinergi pariwisata alam dalam sebuah kendali manajemen lingkungan oleh *stakeholders* akan dapat meningkatkan daya dorong dan daya tariknya. Juga lakukan pembenahan fasilitas pendukung pariwisata alam dengan benuansa ekoturis. Input output supaya dapat digunakan untuk prediksi dampak ekonomi wilayah dan dibuat model prediksi proporsi dari sektor-sektor yang kemungkinan besar mengandung pariwisata alam setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu A. 1999. Ekonomi Indonesia Suatu Kajian dan Alternatif Solusi Menuju Pemulihan. Jakarta: Bank Naskah Gramedia dan PT. Alex Media Komputindo
- Anwar A. 1982. Membangun Model Ekonometrika. Bogor: Institut Pertanian Bogor, Program Pascasarjana
- 1996. Ekonomi Sumber Daya. Bogor: Institut Pertanian Bogor, Program Pascasarjana
- Alikodra SH. 1998. Koservasi Kehati Dalam Pembangunan Berkelanjutan. Bogor: Sosialisasi Inmendagri Nomor 35 tahun 1997, tanggal 30-31 Juli 1998 halaman 5.
- 1999. Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Memberdayakan Potensi Kehati. Samarinda: Seminar Pemasyarakatan Kehati, tanggal 9-10 Februari 1999 halaman 2
- 2000. Otonomi Daerah. Bogor: Sosialisasi Inmendagri Nomor 35 tahun 1997, tanggal 30-31 Juli 1998 halaman 5.
- Arrowsmith Colin, Inbakaran Robert. 2001. Estimating Environment Resiliency For The Grampians National Park, Victoria, Australia: a Quantitative Approach. Tourism Management 23:295-296
- As'ad. 1987. Psikologi Industri. Ed. 4. Yogyakarta: Percetakan Liberty
- [BAPPEDA] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jambi. 1999. Tabel I-O. Jambi: Kerjasama Dengan BPS Setempat

[BAPPEDA] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jambi. 1999. Buku PDRB. Kerinci: Kerjasama Dengan BPS Setempat

Barber Charles Victor, Afiff Suraya, Purnomo Agus. 1997. Melurukan Arah Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Bjork P. 2000. Ecotourism From a Conceptual Perspective an Extended Definition of Unique Tourism Form. *International Journal of Tourism Research*: 2: 189-202

Blake J. 1989. *Planning Local Economic Development-Theory and Practice*. California: Sage.

[BPS] Biro Pusat Statistik Propinsi Jambi. 2000, Indikator Kesejahteraan. Jambi: Hasil Susenas.

Bobo. 2003. *Transformasi Ekonomi Rakyat*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.

Casti Francesco DI, Balaji Venkataraman.. 2002. Tourism Biodiversity and Information. *Annals of Tourism Research* 1: 269-270.

Clarke Jackie, Denman Richard, Hickman Gordon, Slovak Julius. 1999. Rural Tourism in Roznava Okres: a Slovak Case Study. *Tourism Management* 22: 200-201

Davis Johnson. 1987. *Forest Management*. New York: Mc. Graw Hill Book Company

Deng Jinyang, King Brian, Baner Thomas. 2002. Evaluating Attractions For Tourism. *Annals Of Tourism Research* 2: 422-423.

[DEPDAGRI] Departemen Dalam Negeri. 1999. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Jakarta: Restu Agung

[DIRJEN PARIWISATA DEPARPOSTEL] Direktorat Jendertal Pariwisata Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. 1990. Undang-undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataaan. Jakarta: Dirjen Pariwisata.

———. 1998. Pedoman Pengembangan Ekowisata. Jakarta: Bina Objek dan Tujuan Wisata.

[DIRJEN PHPA DEPHUT] Direktorat Perlindungan dan Pelestarian Hutan Departemen Kehutanan. 1986. Jakarta: Informasi Taman Nasional.

———. 2001. Lokakarya Pengembangan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi. Bogor: Dirjen PIIPA.

Ecotourism Society. 1993. Ecotourism: A Guide For Planners and Managers. Linberg and Hawkins, Editor. USA: North Benington Vermont.

Fandeli. 2000. Peranan Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Pariwisata Alam di Indonesia. Bogor: Lokakarya Pengembangan Ekoturisme di Kawasan Konservasi, tanggal 24-27 Juli 2000, halaman 3.

Fazriyaz. 1998. Analisis Sosial Ekonomi Petani Peladang di Taman Nasional Kerinci Seblat dan Petani Peladang Peserta Transmigrasi di Propinsi Jambi [Tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor, Program Pascasarjana

Gitosudarmo. 1997. Prilaku Keorganisasian. Ed. 1. Yogyakarta: Percetakan Liberty.

- Goodwin Haroki, Roe Dilys. 2001. Tourism Livelihoods and Protected Areas: Opportunity For Fair Trade Tourism In and Arround National Parks. *International Journal of Tourism Research* 3: 377-378.
- Gossling Stefan. 2002. Human-Environmental Relations With Tourism. *Annals Of Tourism Research* 2: 340-343.
- Ham SH. 1992. *Environmental Interpretation*. USA: North American Press.
- Hanafiah. 1998. *Aspek Lokasi dalam Analisis Ekonomi Wilayah*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Hoover. 1997. *Pengantar Ekonomi Regional*, terjemahan dari *Economic Regional*. Jakarta: LPFE-UI.
- Hughes George. 2002. Environmental Indicators. *Annals Of Tourism Reseach* 2: 462
- Hufschmidt MM and Dixon JA. 1992. *Lingkungan Sistem Alami dan Pengembangan*, Penerjemah, Reksohadiprodo. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- [IPSP] Inter Provincial Spatial Plan. 1999. Balai TNKS dan Geosis Konsultan: Laporan Akhir.
- [IUCN] International Union For Consevation Of Nature And Natural Resources. 2000. *The IUCN Protected Area Management Categories*: [Http://www.cardiff.ac.uk/cplan/sacl/](http://www.cardiff.ac.uk/cplan/sacl/) Accesed at July22, 2003. No.3:1.
- Joppe Marion. 1996. Sustainable Community Tourism Development. *Tourism Management*: 17: 475-476.

- John, MacKinnon K, Child G, Thorsell J. 1990. Pengelolaan Kawasan yang Dilindungi di Daerah Tropika. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Junville, Twiight, Becker. 1987. Outdoor Recreation management- Theory and Application. Stage College, PA. USA: Venture Publishing Inc.
- Kamaluddin. 1987. Ekonomi Transportasi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kadariah. 1985. Ekonomi Perencanaan. Jakarta: LPFE-UI.
- [KANWIL DEPHUT] Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Jambi. 1997. Neraca Sumber Daya Hutan Propinsi Jambi. Jambi: NSDA.
- Kennedy, P. 1998. A Guide to Econometrics, 4<sup>th</sup> ed. Massachusset: Blackwell Publisher.
- Kodyat H. 1998. Ekowisata di Indonesia. Bali: Workshop dan Pelatihan tanggal 25 Juni-2 Juli 1998, halaman 2.
- Ko James T.G. 2001. Assesing Progress of Tourism Sustainability. Annals Of Tourism Research 3: 818
- Lindberg Kreg, Hawkins Donald E, penyunting. 1995. Ekoturisme: Petunjuk Untuk Perencana dan Pengelola. Jakarta: Private Agencies Collaborating Together (PACT) dan Yayasan Alam Mitra Indonesia (ALAMI)
- Loon Rael M. 2001. Ecotourism Ventures: Rags or Riches. Annals Of Tourism Research 1: 894-895.

- Marin Cipriano, Jafari Jafar. 2002. Sustainable For Sustainable Destination. *Annals Of Tourism Research* 1: 266-268.
- Nasution, L. 1990. Penataan Ruang Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Tanah Dalam Menunjang Pembangunan Berkelanjutan. *Ujung Pandang: Seminar Penataan Ruang*, tanggal 9-10 Oktober 1990.
- Nazara, 1997. Analisis Input Output. Jakarta: LPFE-UI.
- Orams Makr B. 1995. Toward a More Desirable Form Ecotourism. *Tourism Management*: 16:3-4.
- Parjoni. 2000. Pengelolaan Wisata Alam dalam Kawasan TNKS Propinsi Jambi [Laporan Tugas Akhir]. Institut Pertanian Bogor: Program Diploma III. Fakultas Kehutanan.
- Pearce, Turner. 1990. *Economic of Natural Resources and The Environment*. Sydney: Harvester Wheatsheaf.
- Priskin Juliana. 2000. Assesment Of Natural Resources For Nature-Based Tourism: The Case Of Central Coast Region Of Western Australia. *Tourism Management* 22: 639.
- Priskin Juliana. 2000. Assesment Of Natural Resources For Nature-Based Tourism: The Case Of Central Coast Region Of Western Australia. *Tourism Management* 22: 639.
- Rosdiana. 1994. Pengembangan Wisata Alam di Taman Nasional Gunung Halimun Jawa Barat [Tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor, Program Pascasarjana.
- Roslita. 2001. Perencanaan Lanskap Wisata di Kawasan TNKS Propinsi Jambi Menggunakan Sistem Informasi Geografis

- [Tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor, Program Pascasarjana.
- Ross Sheryl, Wall Geoffrey. 1999. Toward Congruence Between Theory and Practice. *Tourism Management*: 20 : 123-125.
- Safri, M., Siregar, H., Anwar, A., dan Nasendi, B. (1996). "Wisata Budaya dan Ekologi: Studi Menggunakan Metode Contingency Valuation dan Metode Biaya Perjalanan. *Duta Rimba*, 197198/20, November/Desember
- Safri. 1996. Dampak Pariwisata Percandian Muara Jambi Terhadap Ekonomi Wilayah Kabupaten Dati II Batang Hari Jambi dan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Lokasi serta Faktor Permintaan yang mempengaruhinya [Tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor, Program Pascasarjana.
- Sandra. 1994. Studi Permintaan Agrowisata Sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan Agrowisata, Studi Kasus PTP XII Rancabali Bandung Jawa Barat. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Sanim B. 1997. Metoda Evaluasi Ekonomi Sumberdaya dan Jasa-jasa Lingkungan. Makalah Pelatihan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu. Bogor: Institut Pertanian Bogor, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut.
- Sharpe, 1982. *Interpreting The Environment*. Second Edition. United States Of America: John Wiley & Son.
- Sihite Richard. 2000. *Tourism Industry (Kepariwisataan)*. Surabaya: Penerbit SIC.
- Soemarwoto. 2001. *Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup-Atur Diri Sendiri*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. UGM.

- Soemarwoto. 2001. Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup-Atur Diri Sendiri. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. UGM.
- Suratmo. 1999. Strategi Dalam Menghadapi Masalah Lingkungan Dunia. Bogor: Institut Pertanian Bogor, Program Pascasarjana PSL.
- Suryana. 2000. Ekonomi Pembangunan Problem dan Tantangan. Jakarta: Salemba Empat.
- Suryana. 2000. Ekonomi Pembangunan Problem dan Tantangan. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumardi, Evers Han Dieter. 1982. Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok. Jakarta: Rajawali
- Suparmoko, Suparmoko Maria R. 2000. Ekonomika Lingkungan. Yogyakarta: BPFE.
- Suwantoro. 2001. Dasar-dasar Pariwisata. Yogyakarta: Andi Offset
- Todaro, Michael P. 1994. Pembangunan ekonomi di Dunia Ketiga, Penerjemah Abdullah dan Munandar. Jakarta: Erlangga.
- Tosun Cevat. 2000. Challenges of Sustainable Tourism Development in The Developing Word: The Case of Turkey. *Tourism Management*: 22: 289-303.
- Umran. 1996. Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Sektor Pertanian dan Sektor Lainnya di Kabupaten Dati II Kepulauan Riau dalam Konteks Pembangunan Wilayah [Tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor, Program Pascasarjana.

- Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.  
Jakarta: Kementrian Lingkungan Hidup.
- Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.  
Jakarta: Restu Agung.
- Wahab, 1992. Manajemen Kepariwisata. Alih Bahasa Frans  
Gromang. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Weight. 1996. Sustainable Ecotourisme Balancing Economic  
Environmental and Social Goal Within an Ethical Frame  
Work. Development. Canada: Land Resources Development  
Alberta Economic Development Tourism
- World Bank. 2001. Indonesia: Environmental and Natural  
Resources Management In A Time Of Transaction.  
Washington DC: World Bank Report.
- Yoety. 1982. Pengantar Ilmu Pariwisata. Jakarta: Angkasa.
- . 1990. Pemasaran Pariwisata. Bandung: Angkasa
- Ziffer A. Karen, Young and Erust. 1998. Ecotourism: The Uneasy  
Alliance. International Consevation: First In Conservation  
International Services Of Working Paper: 1-3

# Pengembangan WISATA ALAM

## DENGAN PENDEKATAN BIAYA PERJALANAN

Pendekatan biaya perjalanan merupakan salah satu alat valuasi ekonomi lingkungan untuk menilai secara kuantitatif jasa sumberdaya alam seperti halnya wisata alam di Taman Nasional dan lain sebagainya. Wisata alam berbeda dengan wisata masal. Dengan tujuan agar wisata alam yang identik dengan wisata lingkungan, perlu dilakukan implementasi perhitungan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan ke sebuah objek wisata alam.

Buku ini menyajikan terminologi wisata alam dan beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangannya, bagus untuk dibaca para mahasiswa, akademisi dan praktisi. Anda juga dapat membaca beberapa hasil riset terkait dengan buku ini, sehingga lebih memahami dan dapat menginterpretasikan pendekatan yang digunakan.



**Dr. Muhammad Safri, SE., M.Si** adalah dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, menamatkan pendidikan pada Fakultas Ekonomi Ull Yogyakarta, S2 pada Ilmu Perencanaan Wilayah dan Pedesaan IPB dan S3 pada Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB. Pernah mengecam berbagai pelatihan singkat seperti Pelatihan tingkat Dasar Tehnik Perencanaan Pembangunan Daerah di FE Unsyiah Kuala Banda Aceh dan tingkat intermediate di Amherst, Universitas Massachusetts di Amerika Serikat. Aktif mengajar di beberapa Perguruan Tinggi Swasta.

